



Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah
BAPPEDA DIY



PEMULIHAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI PANDEMI COVID-19 DI DIY

**STUDI KASUS PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH DIY
DALAM PEMULIHAN COVID-19**

Rahayu Endang Pujiati, Imam Karyadi Aryanto
Emy Kuspariyati, Pinkan Mariskania Pasuhuk, Aris Widiyanto
MA Fathoni, Danang Aryo Prakoso

LKIS

**Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19
di Daerah Istimewa Yogyakarta
Studi Kasus Program Kegiatan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemulihan Covid-19**

Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Studi Kasus Program Kegiatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemulihan Covid-19

xii + 108 halaman, 15 x 23 cm

ISBN:

978-623-7177-87-6

Penulis:

Rahayu Endang Pujiati

Imam Karyadi Aryanto

Emy Kuspanyati

Pinkan Mariskania Pasuhuk

Aris Widiyanto.

M.A Fathoni

Danang Aryo Prakoso

Editor:

Tim Penulis

Desain Sampul:

Imam Karyadi Aryanto

Sumber Gambar:

atribut hak cipta freepik

People vector created by stories - >

Penerbit:

LKiS

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4, 4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

Anggota IKAPI

Percetakan:

LKiS

Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul

Jl. Parangtritis Km. 4, 4 Yogyakarta

Telp.: (0274) 387194

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga Tim peneliti Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah BAPPEDA DIY dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ‘Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY: Studi Kasus Program Kegiatan Pemerintah DIY Dalam Pemulihan Dampak Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 telah menghantam keras kehidupan sosial ekonomi masyarakat global dan termasuk di DIY. Kehidupan ekonomi selama pandemi terasa berat dimana sejumlah besar kegiatan ekonomi dipaksa berhenti dalam rangka pemutusan rantai penularan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi DIY melambat, tingkat pengangguran meningkat, tingkat pendapatan masyarakat turun, daya beli masyarakat turun hingga meningkatnya angka kemiskinan. Tidak berbeda, kehidupan sosial masyarakat juga mengalami perubahan, masyarakat mengalami kecemasan, ketakutan dan rasa depresi akibat dipaksa untuk membatasi gerak hingga isolasi diri. Ruang ruang sosial yang selama ini menjadi ruang relaksasi dan ekspresi mendadak hilang digantikan ruang ruang daring dimana tidak semua lapisan masyarakat merasa nyaman dan mampu mengaksesnya.

Pemerintah Daerah DIY selama Pandemi Covid-19 telah melakukan segala upaya untuk mereduksi dampak pandemi sehingga tata kehidupan sosial ekonomi masyarakat DIY tetap berjalan dan menuju kondisi yang semakin baik. Penelitian ini mengingatkan kita agar tidak pasif dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menjadikannya sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan dalam kesiapsiagaan bencana dan percepatan transformasi digital untuk pelayanan publik yang cepat, mudah transparan dan akuntabel. Pandemi Covid-19

juga bukan alasan untuk berhenti berinovasi khususnya di sektor pariwisata, seni budaya dan UMKM. Hal ini ditegaskan dalam hasil penelitian ini bagaimana sejumlah pelaku di ketiga sektor tersebut bangkit dan makin berdaya saing lewat beragam platform digital.

Saya berharap temuan praktik praktik baik dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah DIY untuk membuat kebijakan yang tepat dan cepat dalam pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada Tim Peneliti BPPSD BAPPEDA DIY atas partisipasinya mendukung pembangunan DIY khususnya penanganan Pandemi Covid-19 yang merupakan prioritas Bapak Gubernur DIY.

Yogyakarta, November 2021

Kepala
BAPPEDA DIY

Drs. BENY SUHARSONO, MSi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ v

DAFTAR TABEL ~ vii

DAFTAR GAMBAR ~ ix

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

1.1 Latar Belakang ~ 1

1.2. Tujuan ~ 4

1.3. Sistematika Penulisan ~ 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ~ 7

2.1 Studi Literatur ~ 7

2.1. Kerangka Pikir ~ 9

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ~ 11

3.1. Metode Dasar Penelitian ~ 11

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ~ 11

3.3 Situasi Sosial dan Narasumber Penelitian ~ 11

3.4. Jenis dan Sumber Data ~ 12

3.5. Teknik Pengumpulan Data ~ 12

3.6. Analisis Data ~ 12

3.7. Keterbatasan Penelitian ~ 13

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ~ 15

4.1. Dampak Sosial Ekonomi ~ 15

4.1.1. Sosial ~ 16

4.1.1.1 Kesehatan ~ 18
4.1.1.2 Kebencanaan ~ 23
4.1.1.3 Ketertiban Sosial ~ 24
4.1.1.4 Pendidikan ~ 25
4.1.1.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ~ 26
4.1.1.6 Keistimewaan DIY ~ 28
4.1.1.7 Kebudayaan ~ 28
4.1.1.8 Pelayanan Sosial ~ 30
4.1.2 Ekonomi ~ 30
4.1.2.1 Sektor Pariwisata ~ 31
4.1.2.2 Koperasi dan UMKM ~ 33
4.1.2.3 Ketenagakerjaan ~ 34
4.1.2.4 Pertanian ~ 35
4.1.2.5 Penanaman Modal ~ 36
4.1.2.6 Perhubungan ~ 38
4.2 Program Penanganan COVID-19 ~ 39
4.2.1 Sosial ~ 43
4.2.1.1 Kesehatan ~ 43
4.2.1.2 Kebencanaan ~ 44
4.2.1.3 Ketertiban Sosial ~ 44
4.2.1.4 Pendidikan ~ 45
4.2.1.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ~ 49
4.2.1.6 Keistimewaan DIY ~ 50
4.2.1.7 Kebudayaan ~ 53
4.2.1.8 Pelayanan Sosial ~ 55
4.2.2 Ekonomi ~ 57
4.2.2.1 Pariwisata ~ 57

4.2.2.2 Koperasi dan UMKM ~	57
4.2.2.3 Ketenagakerjaan ~	58
4.2.2.4 Pertanian ~	58
4.2.2.5 Penanaman Modal ~	59
4.2.2.6 Perhubungan ~	59
4.3. <i>Best Practice</i> (Praktik Baik) ~	59
4.3.1 Sosial ~	60
4.3.1.1 Kesehatan ~	60
4.3.1.2 Kebencanaan ~	61
4.3.1.3 Ketertiban Sosial ~	61
4.3.1.4 Pendidikan ~	62
4.3.1.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ~	64
4.3.1.6 Kebudayaan ~	65
4.3.1.7 Pelayanan Sosial ~	66
4.3.2 Ekonomi ~	67
4.3.2.1 Pariwisata ~	67
4.3.2.2 Koperasi dan UMKM ~	67
4.3.2.3 Ketenagakerjaan ~	68
4.3.2.4 Pertanian ~	68
4.3.2.5 Penanaman Modal ~	69
4.3.2.6 Perhubungan ~	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ~	71
5.1 Kesimpulan ~	71
5.2 Saran ~	71
DAFTAR PUSTAKA ~	73
DAFTAR LAMPIRAN ~	81
PROFIL PENULIS ~	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator SPM Kesehatan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 ~ 21

Tabel 2 Tingkat Penurunan Kedatangan dan Keberangkatan Di Terminal DIY (Juni-September 2021) ~ 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir ~ 9

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan DIY Tahun 2016-2020 ~ 17

Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY 2019-2021 ~ 35

Gambar 4. Kinerja Pelaksanaan BTT Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 ~ 40

Gambar 5. Proporsi Prioritas Penanganan Covid-19 Pemda DIY Tahun 2021 (s.d 31 Agustus 2021) ~ 41

Gambar 6. Tren Kasus Positif di DIY 2020-2021 ~ 42

Gambar 7. Tren Harian Meninggal Kasus Positif di DIY 2020-2021 ~ 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19) telah memberikan dampak global berupa perubahan tatanan kehidupan di sejumlah sektor. Kasus Covid-19 pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang berasal dari kontak dengan warga negara Jepang yang dinyatakan terjangkit Covid-19 setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia (www.kompas.com). Sampai dengan saat ini (11 November 2021) terdapat 4.249.758 kasus terkonfirmasi, dengan jumlah kasus aktif sebanyak 9.486 kasus, 4.096.664 sembuh, dan 143.608 meninggal dunia (www.covid19.go.id). Adapun untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sampai dengan 11 November 2021 tercatat 156.259 kasus konfirmasi, 150.490 orang sembuh, dan 5.255 orang meninggal dunia (<https://corona.jogjaprovo.go.id>).

Dari berbagai studi dan data yang dirangkum menunjukkan adanya perubahan atau dampak dari Pandemi Covid-19 di berbagai negara. Kebijakan *lockdown*, isolasi, karantina, dan pembatasan sosial terbukti menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 hingga saat ini (Mallik, 2021). Akan tetapi, langkah-langkah tersebut juga diikuti resiko dampak di sektor lain, seperti ekonomi, sosial, hingga kesehatan itu sendiri. Menurunnya perekonomian sebagian besar masyarakat menjadi permasalahan yang kini tengah dihadapi semua negara. Beberapa isu permasalahan yang sering terjadi diantaranya resiko kesehatan yang tinggi di tempat kerja (Mikolai, 2020), pemutusan hubungan kerja (Eriquez 2020), inflasi harga, terutama kebutuhan pokok, karena terkendalanya arus barang dan jasa (Poudel, 2020) dan isu-isu lainnya. Dampak langsung di atas juga membawa dampak

lanjutan seperti misalnya kerawanan atau ancaman keamanan pangan dan peningkatan hutang tidak produktif dalam keluarga (Eriquez 2020). Kondisi tersebut juga dialami di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara dengan populasi tertinggi ke-4 dunia diprediksi akan mendapatkan dampak yang lebih besar dan waktu pemulihan yang lebih lama jika dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk lebih rendah (Djalantie. R., dkk, 2020 : 2).

Pemerintah Daerah DIY sejak kasus pertama tahun 2020 ditemukan, telah mengantisipasi dengan menetapkan status tanggap darurat dan membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan tujuan untuk : (1) Melakukan penanganan Covid-19 dan dampak ikutannya di DIY; (2) Melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19 di DIY (3) Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan, (4) Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respons terhadap Covid-19.

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY melalui Gugus Tugas telah melaksanakan program/kegiatan penanganan Covid-19 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga. Penanganan pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah DIY terbagi dalam bidang-bidang gugus tugas antara lain (1) Sekretariat BPBD, (2) Kesehatan (3) Ekonomi; (4) Pendidikan; (5) Sosial Kemasyarakatan; (6) Bidang Komunikasi dan Informasi; (7) Pengamanan dan Penegakan Hukum; serta (8) Logistik.

Pada tahun 2020, dalam rangka pemulihan sosial ekonomi Pemerintah Daerah DIY melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi *markethub* dan stimulus *free* ongkir dalam sektor koperasi UKM.
2. Fasilitasi sarana kebersihan, padat karya pemasangan sarana kebersihan, dan media campaign di sektor pariwisata.
3. Bimtek olahan pangan (Alih Teknologi Informasi) di sektor kelautan perikanan.
4. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia, pemberdayaan peserta Balai Latihan Kerja untuk pembuatan Alat

Pelindung Diri, pembentukan tenaga kerja mandiri untuk tenaga kerja terdampak, dan padat karya untuk sektor tenaga kerja.

5. Pemantauan barang pokok.
6. Pemberdayaan koperasi susu, bimtek pemanfaatan pekarangan, dan kampanye panganekaragaman pangan untuk ketahanan pangan.

Adapun pada tahun 2021, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan penanganan Covid-19 melalui belanja program/kegiatan APBD Regule pada masing-masing OPD dan Belanja Tidak Terduga yang dikoordinasi oleh gugus tugas. Prioritas penanganan adalah untuk (1) Prioritas kesehatan; (2) Penanganan dampak ekonomi; (3) Penyediaan *social safety net*/ jaring pengaman sosial.

Berkenaan dengan prioritas kesehatan penanganan Covid-19 di DIY, kajian Nainggolan, S., dkk. (2021) merefleksikan kesiapan rumah sakit dan puskesmas di DIY yang masih perlu dioptimalkan dalam memenuhi standar WHO. Adapun kajian Dinas Kesehatan (2020) disimpulkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol sudah cukup baik tetapi masih memerlukan peningkatan pemahaman melalui KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) agar penerapan protokol kesehatan lebih optimal serta mengurangi resiko penularan.

Berkenaan dengan penanganan dampak ekonomi, dalam studi Kajian Kebijakan Pemulihan Ekonomi Daerah Terdampak Covid-19 (2020), Pemerintah DIY telah menyiapkan strategi multi-lintas sektor berdasar komoditas dalam rangka pemulihan ekonomi yang dipetakan berdasar resiko aktivitas terhadap Covid-19, dari tahun 2021-2022. Dalam Kajian Efektivitas Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (2020) mencatat bahwa Covid-19 telah memberikan dampak yang begitu besar pada perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia serta dibutuhkan kebijakan yang bersifat *extraordinary* untuk menanggulangi dampak tersebut agar perekonomian tidak semakin terpuruk melalui berbagai program pemerintah yang

efektif dan tepat sasaran sehingga membawa manfaat dan berdaya guna bagi pembangunan ekonomi.

Adapun dari aspek sosial, penelitian IGPA dan Forbil Insitute (2020) mencatat bahwa wabah Covid-19 memberikan dampak pada pekerja rentan di DIY, terlebih karena sebanyak 14.529 pekerja yang dirumahkan maupun di-PHK yang kemudian dari pekerja layak menjadi pekerja rentan (*casual workers, freelancer*, sektor informal) sebagai dampak krisis. Pekerja rentan dalam kajian tersebut mengalami situasi ketidakpastian sosial ekonomi dan jaminan sosial yang layak masih menjadi persoalan.

Berangkat dari kondisi dan intervensi kebijakan/ program/ kegiatan oleh Pemda DIY pada tahun 2020 sampai dengan 2021 serta studi terdahulu yang telah dilakukan, program/kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan perlu diketahui bagaimana dampak sosial ekonomi, progam pemulihan dan *best practice* (praktik baik) kebijakan berperan dalam menanggulangi Pandemi di DIY.

1.2. Tujuan

Dalam rangka mengetahui lebih lanjut tentang upaya Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, tim Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah, Bappeda DIY melaksanakan studi kasus terhadap Program/ Kegiatan Pemerintah Daerah DIY dalam Pemulihan Covid-19 dengan tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 di DIY.
2. Mendeskripsikan program pemulihan sosial ekonomi yang dilaksanakan Pemda DIY
3. Mendeskripsikan *best practice* kebijakan pemulihan Covid-19 di DIY.

1.3. Sistematika Penulisan

Kajian Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan untuk mendeskripsikan latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan
2. BAB II Kerangka Pikir/Teori/Konseptual akan menyajikan studi literatur dan kerangka konsep teori/ pikir/ konsep yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Bab III Metode Penelitian, akan menyajikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
4. BAB IV Pembahasan, akan menyajikan pembahasan dan diskusi terkait hasil penelitian ini.
5. BAB V Penutup, akan menyajikan kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Studi Literatur

Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi secara global pada tahun 2020 telah memunculkan banyak penelitian dari kalangan akademik dari berbagai aspek, mulai dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pandemi Covid-19 merupakan isu yang sangat baru dalam dunia penelitian. Penelitian yang dilakukan lebih banyak ditujukan untuk memahami serta mengidentifikasi perilaku pandemi agar dapat menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi yang langsung dapat diterapkan supaya kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Pada penelitian ini, fokus penelitian terdahulu mengenai Pandemi Covid-19 adalah pada aspek ekonomi dan sosial sesuai dengan tema penelitian.

Penelitian oleh Pawar (2020) menganalisis dampak Pandemi Covid-19 dan respon beberapa negara terhadap Pandemi pada tahun 2020. Pada awal Pandemi, beberapa negara menjadi pusat penyebaran virus dengan naiknya jumlah kasus secara signifikan, seperti Amerika Serikat dan Italia. Peneliti menyampaikan analisis atas tingginya kasus infeksi di Italia terkait dengan kondisi demografi negara tersebut di mana jumlah penduduk lanjut usia cukup banyak. Negara yang cukup berhasil dalam menekan jumlah kasus Covid-19 adalah Australia dan Selandia Baru dengan menerapkan pembatasan-pembatasan tertentu. Negara berkembang menghadapi tantangan yang berbeda dalam penanganan Pandemi Covid-19. Misalnya di India, pembatasan sosial menjadi hal yang sulit diterapkan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, karena akses terhadap transportasi publik tinggi, dan beberapa indikator menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih, toilet umum, listrik, internet menyebabkan naiknya kasus infeksi Covid-19 di negara tersebut.

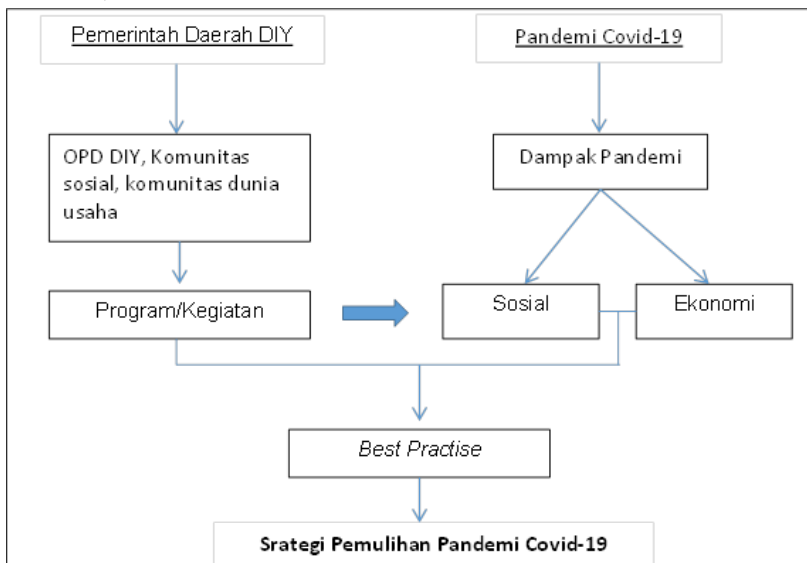
McKibbin dan Fernando (2020) memprediksi dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi makro ekonomi secara global menggunakan 7 skenario tingkat keparahan pandemi di Cina sebagai negara awal terjadinya dengan asumsi tingginya pengaruh Cina terhadap ekonomi dunia dan pandemi akan terjadi secara global. Analisis dampak meliputi angka kematian dan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) pada negara-negara anggota G-20. Pada skenario tingkat keparahan yang paling tinggi, Indonesia diprediksi mengalami penurunan PDB hingga 4,7% (pertumbuhan ekonomi -4,7%) pada tahun 2020, dan angka kematian sebesar 1,13%. Sedangkan pada skenario tingkat keparahan paling rendah, Indonesia diprediksi mengalami penurunan PDB sebesar 0,1% (pertumbuhan ekonomi -0,1%) dan angka kematian 0%.

Pada aspek sosial, Pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak yang cukup besar. Bhattacharya (2020) menyebutkan beberapa dampak sosioekonomi dari Pandemi Covid-19 adalah *social distancing* dan *self-isolation*, pembatasan perjalanan, berkurangnya tenaga kerja di semua sektor ekonomi, hilangnya pekerjaan, penutupan sekolah dan gangguan kehidupan normal anak-anak.

Pada level nasional, dampak ekonomi yang cukup signifikan juga dirasakan akibat pandemi. Susilawati et al. (2020) menganalisis dampak ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 di Indonesia. Sektor ekonomi yang terdampak oleh pandemi adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan sektor lain. Namun, sektor ekonomi yang paling terpengaruh adalah rumah tangga. Penelitian menganalisis potensi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data atau informasi yang telah dipublikasi. Pada skenario terburuk, ekonomi Indonesia tumbuh -0,4%, konsumsi rumah tangga tumbuh 1,6%, dan konsumsi pemerintah tumbuh 3,73%. Pada skenario yang lebih baik, ekonomi Indonesia tumbuh 2,3%, konsumsi rumah tangga tumbuh 3,2%, dan konsumsi pemerintah tumbuh 6,83%.

2.1. Kerangka Pikir

Dampak Pandemi Covid-19 dirasa sangat berat dan memerlukan respon dan tindak lanjut yang sistematis dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah DIY. Pemerintah Daerah DIY lewat program dan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus bergerak untuk mencatat, merekam dan melakukan penanganan Pandemi Covid-19. Respon terhadap Pandemi Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah DIY namun juga bermitra dengan beragam komunitas sosial, akademisi dan komunitas dunia usaha. Pengalaman OPD DIY dan mitranya selama menangani Pandemi Covid -19 tersebut merupakan modal berharga bagi Pemerintah DIY untuk menentukan strategi kebijakan dalam pemulihan sosial ekonomi pasca Pandemi Covid-19.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Pengalaman OPD dalam menangani Pandemi Covid-19 layak untuk dikenali, dipelajari, dan dipahami sebab merupakan fakta atau *evidence* (temuan) di lapangan. Fakta tersebut dapat dikenali dengan mendeskripsikan dampak apa saja yang terjadi dan program kegiatan apa yang dilakukan untuk meresponnya. Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, OPD akan mendapat beragam umpan balik termasuk peluang munculnya sebuah *best practise* atau praktik baik dalam penanganan Covid-19.

Praktik baik tersebut layak diperluas cakupan dan manfaatnya agar menjadi wujud kesiapsiagaan Pemerintah Daerah DIY dan Masyarakat DIY dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan mengancam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Dasar Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *post positivism* atau *enterpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis. (Sugiyono, 2020). Peneliti menggunakan metode ini untuk memahami fenomena pemulihan dampak sosial ekonomi Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan demikian jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang (Sugiyono, 2020). Fokus penelitian ini adalah program atau kegiatan pemulihan sosial ekonomi Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah DIY dan mitranya di tahun 2020-2021.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada bulan Januari sampai dengan September 2021.

3.3 Situasi Sosial dan Narasumber Penelitian

Situasi sosial merupakan obyek penelitian yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2020). Elemen tempat adalah

Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaku adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan aktivitas adalah program atau kegiatan pemulihan sosial ekonomi Pandemi Covid-19. Sampel dalam penelitian ini yang selanjutnya disebut sebagai narasumber. Narasumber dipilih secara *purposive* yaitu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah DIY (OPD DIY) dan mitranya yang terlibat secara langsung dalam program atau kegiatan pemulihan Pandemi Covid-19 di Yogyakarta. Jumlah narasumber dalam penelitian ini adalah 20 instansi atau organisasi.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data hasil wawancara dengan narasumber. Data sekunder adalah data tersedia yang diberikan oleh narasumber dan instansi terkait.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada *forum discussion group* (FGD) bersama para narasumber. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2020) wawancara akan membantu peneliti untuk mengetahui hal hal yang lebih mendalam dari narasumber dalam menerjemahkan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak ditemukan saat observasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang sistematis melainkan hanya garis garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sarana *Focus Group Discussion* (FGD) dipilih karena dapat digunakan untuk pengumpulan data sekaligus analisis awal untuk isu tertentu bersama sejumlah narasumber terpilih (Kumar, 1987).

3.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian. Analisa data meliputi analisa deskriptif, analisa kategorisasi dan analisa asosiatif atau mengkonstruksi hubungan antar kategori (Sugiyono, 2020). Analisa deskriptif dilakukan dengan cara memilih data yang dianggap penting, baru dan unik yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian. Analisa kategori dilakukan dengan memilah data dalam kategori yaitu sosial dan

ekonomi. Selanjutnya analisa asosiatif yaitu mengkonstruksi atau menghubungkan antar kategori sehingga diperoleh sebuah kesimpulan. Ketiga analisa diatas dilakukan secara utuh atau tidak terpisah.

3.7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan pengalaman dan persepsi pelaksana program kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 di DIY sehingga bersifat subyektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dampak Sosial Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menciptakan suatu kondisi dan skenario baru yang menghadirkan tantangan nyata bagi pelaku ekonomi dan sosial, institusi publik, bahkan seluruh penduduk di dunia termasuk di DIY. Tidak ada satupun negara di dunia yang siap menghadapi Pandemi Covid-19. Penularan yang terjadi dengan cepat, virus yang sulit diobservasi secara langsung, dan karakteristik penyakit yang belum sepenuhnya diketahui menjadi beberapa penyebab sulitnya memprediksi kapan pandemi akan berakhir. Biaya perawatan pasien yang mahal, membutuhkan investasi obat dan peralatan kesehatan yang besar, serta ketergantungan yang besar terhadap obat-obatan, vaksinasi, dan alat kesehatan impor. Sedangkan kemampuan pemerintah, di negara manapun, terbatas dalam menangani Covid-19. Oleh karena itu, membangun modal sosial dan berkolaborasi dengan semua *stakeholders* terkait menjadi salah satu alternatif cara untuk menanggulangi Covid-19 beserta dampaknya di DIY.

Kerumunan dan mobilitas manusia adalah tulang punggung ekonomi DIY selama ini karena proporsi PDRB yang cukup besar di DIY dari sektor jasa, terutama pariwisata dan aktivitas turunannya. Rimawan Pradiptyo, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UGM, menyampaikan bahwa kondisi pra Pandemi tidak akan kembali dalam 5-10 tahun ke depan. Pada saat terjadi Pandemi Covid-19 ini, terjadi eskalasi dari VUCA yaitu *volatility* (volatilitas), *uncertainty* (ketidakpastian), *complexity* (kompleksitas), dan *ambiguity* (ambiguitas), yang menghasilkan kemampuan untuk bertahan, menumbuhkan kemampuan untuk beradaptasi dan inovasi, serta memunculkan perubahan sosial dalam masyarakat. Hal ini selanjutnya akan membawa kepada

tatanan sosial dan ekonomi yang baru dalam masyarakat paska Pandemi Covid-19.

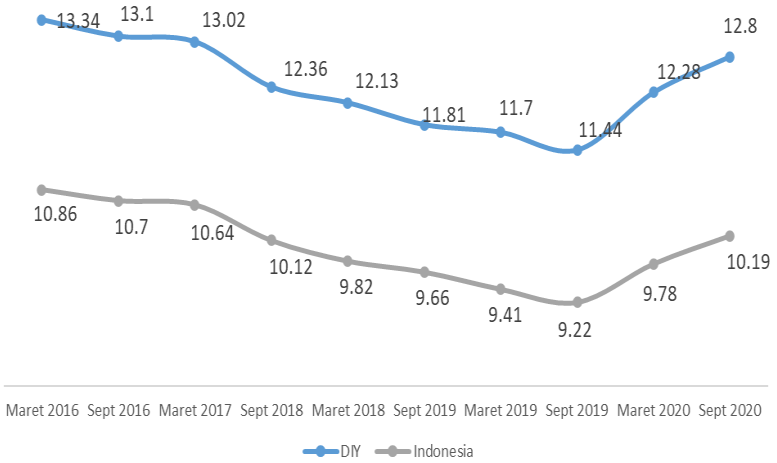
4.1.1. Sosial

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sosial merupakan salah satu isu yang mengemuka. Laporan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 17 tujuan SDGs, tujuan-tujuan yang terkait dengan sosial, ekonomi dan kesehatan merupakan tujuan-tujuan yang mendapatkan dampak tinggi (Sachs dkk, 2020).

Dampak-dampak sosial terjadi karena ketidakstabilan ekonomi global karena terjadinya pembatasan mobilitas dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang menyebabkan gangguan pada rantai perdagangan baik dari sisi *supply* maupun *demand* (Budastra, 2020; El Erian, 2020) dan menurunnya produktifitas pekerja karena terinfeksi virus (Suharyadi dkk, 2020). Kondisi tersebut menyebabkan terhentinya aktifitas ekonomi dan pekerja yang dirumahkan sehingga terjadi penurunan pendapatan masyarakat dan berdampak pada meningkatnya tingkat kemiskinan. Pada Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional sebesar 7,07%, meningkat 1,84% poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 5,23%. Sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak Covid-19 (BPS, 2020).

Dampak tersebut juga dirasakan DIY. Data BPS menunjukkan terdapat peningkatan tingkat kemiskinan DIY di tahun 2020 menjadi sebesar 12,28%. Tingkat kemiskinan DIY di tahun 2020 tersebut mengembalikan pada kondisi mendekati tingkat kemiskinan DIY di tahun 2017.

Sumber : BPS



Gambar 2. Tingkat Kemiskinan DIY Tahun 2016-2020

Dampak sosial tersebut juga menimbulkan persoalan-persoalan sosial dan dilema sosial ketika kita menyikapi kondisi *new normal*. Persoalan sosial tersebut antara lain: 1) stigma bagi penderita Covid-19 yang melahirkan sikap pengucilan hingga kekerasan; 2) kecurigaan pelabelan positif Covid-19 oleh para tenaga kesehatan; 3) arus informasi *hoax* yang menyebabkan perpecahan dan kebingungan; 4) ketakutan dan kekhawatiran yang memicu stres dan depresi. Sisi lain selama pandemi persoalan sosial lama ditengarai makin bertambah antara lain: 1) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 2) Depresi anak didik orang tua dan pengajar karena lambat beradaptasi dengan sistem pembelajaran *online*; 3) Ancaman anak putus sekolah karena orang tua kehilangan pekerjaan; 4) Jumlah anak yatim piatu karena orang tua meninggal sebagai akibat Covid-19; 5) Depresi yang dialami para lansia karena pembatasan sosial. Persoalan-persoalan sosial seperti ini sulit diatasi sendiri oleh pemerintah karena sifatnya yang tersembunyi dan diabaikan. Oleh sebab itu perhatian dan dukungan sosial dari masyarakat sekitar sangat penting.

Tantangan sosial diatas dapat direduksi dengan mengarusutamakan karakter “*kawruh jiwa*” yaitu mawas diri sebuah olah rasa yang dinubuatkan untuk merasakan rasa orang lain (*tepo*

sarira), bukan upaya untuk mengidentifikasi keburukan orang lain, melainkan agar tindak tanduk perbuatan dan rasa kita selaras dengan rasa orang lain. Dalam arti ini tidak menyakiti rasa orang lain (*amemangun karyenak tyasing sasama*). Dengan rasa, manusia diajak untuk menemukan kemanusiaan yang universal. Kemanusiaan yang tidak diperkeruh oleh identitasnya.

4.1.1.1 Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak, WHO menyatakan bahwa jumlah kasus dan jumlah kematian akibat Covid-19 lebih besar dari angka resmi yang dilaporkan kepada WHO. Beberapa negara hanya melaporkan kematian Covid-19 yang terjadi di rumah sakit atau kematian orang yang telah dites positif Covid-19. Selain itu, banyak negara tidak dapat mengukur kematian secara akurat karena sistem informasi kesehatan yang tidak memadai atau kekurangan sumberdaya (WHO, <https://Covid-19.who.int/>).

Dampak lain di sektor kesehatan adalah terdapat penurunan layanan kesehatan lain karena sumberdaya kesehatan lebih difokuskan pada penanganan Covid-19. Beberapa pelayanan seperti perawatan kesehatan preventif, layanan *prenatal* dan *postnatal*, perawatan gizi buruk, perawatan kaum rentan (disabilitas, lansia, korban kekerasan berbasis gender), dan kesehatan mental mengalami pelambatan. Pandemi juga menambah beban endemik penyakit menular lain di beberapa negara seperti : kolera, campak, HIV, malaria, dan tuberkulosis (OCHA, PBB, 2020). Akses layanan seperti perawatan jangka panjang, skrining dan perawatan kanker, dan imunisasi rutin juga terdampak (Baird S., dkk, 2020). Penurunan layanan tersebut juga dipengaruhi oleh kecemasan masyarakat untuk datang ke pelayanan kesehatan karena khawatir akan tertular Covid-19 (Livana P.H., dkk., 2020).

Dampak Pandemi Covid-19 di sektor kesehatan juga dialami oleh DIY sebagai provinsi dengan Umur Harapan Hidup (UHH) tertinggi nasional (74,99). Sampai dengan tanggal 11 November 2021 tercatat 156.259 kasus konfirmasi, 150.490 orang sembuh, dan 5.255 orang meninggal dunia (<https://corona.jogjaprovo.go.id>).

Lonjakan kasus di DIY terjadi di Bulan Oktober 2020 dengan puncaknya pada akhir Bulan Januari 2021. Pada periode Bulan Februari 2021 sampai pertengahan Bulan Mei 2021 terjadi penurunan kasus yang signifikan, tetapi pada bulan Mei-Juli 2021 perkembangan kasus di DIY kembali mengalami peningkatan. Kasus harian tertinggi di DIY terjadi pada tanggal 27 Juli 2021, terdapat penambahan 2.732 kasus positif dengan penambahan 104 pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia.

Peningkatan kasus yang terjadi pada antara periode akhir Mei 2021 sampai dengan akhir Juli 2021 disinyalir karena ditemukannya varian delta pada kasus positif di DIY. Penemuan varian delta di DIY dilaporkan oleh Dekan FKMK UGM kepada Menteri Kesehatan RI pada tanggal 10 Juli 2021. Hasil tersebut didapatkan dari tes *Whole Genome Sequencing* (WGS) oleh Laboratorium WGS Pokja Genetik FKMK UGM dengan metode *Amplicon-Based* dari spesimen Covid-19. Pengambilan sampel spesimen dilaksanakan pada Bulan Juni 2021 dan uji sampel dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2021 (Humas Pemda DIY, 2021).

Kondisi tersebut menempatkan kabupaten/kota di DIY berada pada kriteria level 3 (Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo) dan level 4 (kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul), dan menjadi level 4 di semua kabupaten/kota di DIY berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali yang berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021. Instruksi terkait pembatasan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan skema *Work Form Home/Work Form Office* (WFH/WFO) untuk sektor esensial dan kritis, operasional pusat perbelanjaan, tempat ibadah, kegiatan makan di tempat umum, kegiatan konstruksi, kegiatan di fasilitas umum dan sebagainya. Seiring dengan semakin menurun dan melandainya kasus konfirmasi positif dan kasus kematian harian karena Covid-19 di DIY, mulai tanggal 18 Oktober 2021 level PPKM DIY menurun ke level 2 di semua kabupaten/kota berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021.

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan layanan kesehatan. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19 terutama bagi masyarakat populasi resiko tinggi (Kissler S, dkk, 2020). Kondisi ini memberikan beban tambahan bagi pembangunan sektor kesehatan di DIY dimana sebelumnya DIY masih memiliki beberapa pekerjaan rumah terkait pembangunan sektor kesehatan diantaranya masih terjadinya kasus ibu melahirkan, permasalahan stunting, ancaman penyakit infeksi baru, dan tingginya prevalensi beberapa penyakit tidak menular. Khusus untuk permasalahan penyakit tidak menular (PTM), berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 prevalensi beberapa PTM berada di atas rata-rata nasional seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes melitus, stroke, kanker, asma, ginjal kronis, dan gangguan jiwa.

Pandemi Covid-19 menyebabkan kesenjangan layanan kesehatan terutama pada kelompok rentan (Ritchey dkk, 2021). Wanita hamil, anak-anak, dan lansia merupakan bagian dari kelompok rentan bila merujuk Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian SMERU di Kota Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Maros, Kabupaten Badung, dan Kota Kupang pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 secara umum menurunkan jumlah kunjungan ke layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA) terutama layanan imunisasi dasar dan penimbangan anak bawah lima tahun di lima wilayah di Indonesia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kematian ibu dan anak, bagi anak-anak kondisi ini berpotensi menyebabkan *stunting* pada anak. *Stunting* berisiko terhadap penyakit dan kematian dan yang bertahan cenderung memiliki prestasi sekolah yang kurang baik (UNICEF, 2012).

Lansia juga merupakan kelompok yang sangat rentan terdampak Pandemi Covid-19. Persentase tertinggi kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia adalah penduduk usia > 60 tahun yaitu 46,18% (Covid-19.go.id). Selain itu, dengan terbatasnya layanan kesehatan di masa pandemi meningkatkan kerentanan lansia, yang merupakan kelompok yang membutuhkan akses terhadap layanan karena sebagian besar memiliki penyakit kronik/degeneratif (Mawaddah dkk, 2020).

Beberapa capaian indikator SPM kesehatan tahun 2020 di kabupaten/kota di DIY tidak mencapai target yang ditetapkan kecuali di Kota Yogyakarta. Catatan pelayanan luring untuk fasilitas kesehatan di Kabupaten Sleman menurun sebagai dampak Pandemi Covid-19 sehingga beberapa capaian indikator SPM di Kabupaten Sleman tidak mencapai target, seperti: kunjungan ibu hamil, pemantauan kesehatan dasar, cakupan pelayanan lansia, dan cakupan layanan ODGJ.

Tabel 1. Capaian Indikator SPM Kesehatan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020

No	Indikator	Capaian SPM 2020 (%)			
		Kota Yogya- karta	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung- kidul
1	Pelayanan Keseha- tan Ibu Hamil	100	95,12	100	94,49
2	Pelayanan Keseha- tan Ibu Bersalin	100	99,91	99,75	99,83
3	Pelayanan Keseha- tan Bayi Baru Lahir	100	84,60	85,26	89,27
4	Pelayanan Keseha- tan Balita	100	72,80	60,16	87,45
5	Pelayanan Kese- hatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	93,82	59,86	3,53
6	Pelayanan Kese- hatan pada Usia Produktif	100	69,70	84,08	31,69
7	Pelayanan Kese- hatan pada Usia Lanjut	100	28,98	31,33	21,24
8	Pelayanan Keseha- tan Hipertensi	100	61,09	13,16	7,70

9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Berat	100	64,26	31,63	19,81
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	100	92,56	72,23	57,37
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	100	100	41,99	26,17
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100	95,60	43,32	88,11

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul, diolah

Berdasarkan data di atas, capaian SPM kesehatan Kota Yogyakarta tidak mengalami permasalahan selama Pandemi Covid-19, tetapi untuk 3 kabupaten di DIY menunjukkan bahwa beberapa layanan terkait kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak usia pendidikan dasar, kesehatan usia lanjut, kesehatan ODGJ, dan kesehatan orang terduga tuberkulosis tidak dapat dilaksanakan secara optimal selama Pandemi Covid-19.

Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang terhambat karena Pandemi Covid-19 menyebabkan kenaikan kasus kematian ibu di DIY, sampai dengan semester I 2021 jumlah kasus kematian ibu melahirkan sudah mencapai 80 an kasus dari rata-rata jumlah kasus tahunan 40 kasus. Sedangkan terhambatnya layanan kesehatan layanan lansia berisiko meningkatkan tingkat morbiditas dan mortalitas penyakit-penyakit degeneratif.

Penurunan layanan kesehatan juga terjadi pada fasilitas kesehatan milik Pemda DIY yaitu di RSJ Grhasia dan RSP Respira. Hal ini dilihat dari capaian indikator tingkat penggunaan tempat

tidur/*bed occupancy ratio* (BOR) di dua rumah sakit tersebut. Capaian BOR RSP Respira sampai dengan triwulan III tahun 2021 sebesar 28,39% dari target 60% (47,32%), deviasi tersebut karena keterbatasan ruang isolasi untuk pasien dengan penyakit saluran pernapasan yang dicurigai Covid-19 selain itu terdapat petugas yang terpapar Covid-19 sehingga mempengaruhi pengaturan ruang rawat inap ditambah dengan penanganan pasien Covid-19. Adanya petugas yang terpapar Covid-19 juga mempengaruhi layanan rawat jalan di RSP Respira, indikator rata-rata rawat jalan per hari pada triwulan III juga tidak memenuhi dari target yang ditetapkan, dari target rata-rata 80 orang per hari tercapai rata-rata 76 orang per hari. Penurunan BOR juga terjadi di RSJ Grhasia, sampai dengan triwulan III tahun 2021 persentase capaian indikator BOR hanya sebesar 63,39% yang disebabkan salah satunya karena melonjaknya kasus Covid-19.

4.1.1.2 Kebencanaan

Pandemi Covid-19 merupakan bencana baru yang melahirkan sejumlah krisis dimana kita belum siap menghadapinya. Pada masa PPKM darurat kita dihadapkan pada situasi dimana muncul krisis yang sebelumnya tidak pernah kita hadapi dan terjadi bersamaan. Krisis kesehatan dimulai dari krisis ketersediaan layanan rumah sakit, keterbatasan jumlah tenaga medis, oksigen, vitamin, obat-obatan, masker medis, layanan kesehatan untuk pasien bukan Covid-19 dan bahkan ketakutan masuk ke layanan kesehatan. Krisis sosial dimulai dari informasi hoax yang menimbulkan ketakutan, pembatasan sosial yang menyebabkan rasa depresi terutama untuk masyarakat lanjut usia, keterbatasan layanan penanganan jenazah, pelanggaran prosedur kesehatan, kecemasan saat dikerumunan hingga stigma sosial dengan penderita Covid-19. Krisis ekonomi antara lain peningkatan pengangguran terbatasnya ruang gerak ekonomi di sektor pariwisata, transportasi dan kuliner.

Krisis tersebut tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri melainkan perlu keterlibatan banyak pihak. Selama krisis berlangsung, masyarakat DIY dengan berbagai komunitasnya mampu bangkit merespon krisis. Komunitas tersebut bergerak sukarela dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Forum

Pengurangan Resiko Bencana DIY mengkonfirmasi gerakan komunitas tersebut antara lain *sambatan, canthelan, jogo tonggo, serkileran* hingga relawan pemakaman jenazah Covid-19. Gerakan ini merupakan modal sosial di DIY yang terbukti sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena akses dan respon yang cepat.

Forum PRB menegaskan bahwa modal sosial diatas perlu mendapat rekognisi dari Pemerintah dan pelatihan atau arahan untuk peningkatan kapasitas kesiapsiagaan. Hal tersebut mengemuka sebab komunitas dan relawannya tersebut mengalami kebingungan apakah yang dilakukan sudah tepat atau efisien. Relawan relawan komunitas perlu mendapat pembekalan pengetahuan praktis agar mereka tetap aman dan yang dilakukan tepat dan efisien. Forum PRB mengingatkan urgensi untuk rekognisi dan identifikasi kapasita komunitas komunitas tersebut agar dapat dilakukan pembagian peran yang optimal dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan duplikasi di daerah lain. Forum PRB bercerita meski komunitas tanggap krisis banyak bermunculan namun tidak semua daerah (desa/kampung) memiliki dan atau dalam level kapasitas yang sama, sehingga memerlukan kehadiran Pemerintah untuk mendampingi.

4.1.1.3 Ketertiban Sosial

Salah satu tantangan tersulit dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan yang membedakan dengan kondisi bencana lain adalah penerapan kebijakan pembatasan sosial di masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial merupakan kunci penting mengurangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19 (Nasruddin & Haq, 2020). Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurut Nurrahman, (2020) Satpol PP memegang peran penting dalam peran pemerintah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam penagangan penyebaran Covid-19. Satpol PP DIY mengkonfirmasi bahwa pengetatan pembatasan sosial dan penegakan prokes di awal Pandemi sangat sulit. Pendekatan Satpol PP dilakukan secara humanis dengan sosialisasi, menyebar *sticker* dan tatap muka. Hal ini terkonfirmasi di media bahwa di DIY tidak ada kejadian anarkis selama penegakan Prokes. Hal ini berbeda dengan daerah lain

yang sempat viral di sejumlah berita tentang ketegangan dan anarkis antara Satpol PP dengan masyarakat.

4.1.1.4 Pendidikan

Pandemi COVID-19, menurut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora; narasumber) memberi dampak luas bagi siswa/ anak-anak peserta didik. Menurut Dikpora (narasumber), selama pandemi terdapat penurunan hasil belajar berdasar pada hasil asesmen daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY. Menurut Dikpora (narasumber) penurunan tersebut terjadi karena belum efektifnya pembelajaran daring selama pandemi dibandingkan tatap muka (sebelum pandemi). Hal tersebut terkonfirmasi dari studi UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU (2021) bahwa tiga dari empat orang tua di Indonesia memiliki perhatian pada *learning loss* karena disrupsi pandemi pada proses belajar mengajar anak.

Pandemi Covid-19 telah mengubah proses pembelajaran dunia pendidikan yang semula dilakukan di dalam kelas berubah menjadi secara jarak jauh dengan daring (dalam jaringan; *online*). Pendidik, peserta didik dan orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran daring yang efektif dan aktif di rumah masing-masing. Kondisi tersebut dirasa kurang nyaman karena banyak pelaku pendidikan yang belum bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh baik akibat kendala teknis ataupun psikis.

Kendala pembelajaran jarak jauh daring menurut studi UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU (2021) sebagian besar terjadi karena (1) kendala akses internet (57,3%) terutama pada keluarga di perdesaan dan rumah tangga miskin, (2) kendala kurangnya waktu orang tua menemani anak belajar (28,17%) dan (3) kurangnya kapasitas orang tua dalam memberikan pengajaran untuk anak-anaknya (25,3%) Selain itu menurut Dikpora (narasumber) terdapat keterbatasan kepemilikan gawai, minimnya interaksi antar siswa dan guru, penambahan biaya kuota internet dan keterbatasan pengajar dalam mentransnformasi materi pendidikan ke media daring. Kendala psikis menurut Dikpora (narasumber) terlihat ketika anak anak sulit mengikuti

pelajaran secara daring dan merasa bosan terutama untuk anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Orang tua murid juga mengalami tekanan karena sebagian beban pengajaran yang beralih dari guru ke orang tua. Pelajaran daring menuntut peran aktif orang tua dalam mendampingi pembelajaran anak didik.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja sasaran urusan pendidikan yang menjadi target Dikpora DIY terkait capaian ujian nasional dan prestasi pembinaan olahraga sebagai berikut (Rapor Kinerja Dikpora, TW IV, 2020),

1. rata-rata nilai Ujian Nasional untuk SMA maupun SMK disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
2. Indikator prestasi cabang olahraga (peringkat POPNAS) tidak akan tercapai karena adanya surat dari Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor RO.00.01/04.19.1/D.IV-2/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Penundaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XVI Tahun 2021, POPNAS XVI akan dilaksanakan pada tahun 2023

Bagi Pemerintah Daerah DIY, indikator kinerja utama pada urusan pendidikan yang tidak tercapai tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan/penyusunan RPJMD yang akan datang terutama indikator yang sangat terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat serta sinkronisasi pembinaan olahraga ke depan (Rapor Kinerja Dikpora, TW IV, 2020).

4.1.1.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pandemi Covid-19 menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2, narasumber) berdampak pada kaum yang rentan seperti perempuan, anak, bayi, balita, ibu hamil, maupun lanjut usia. Kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat selama pandemi (narasumber). Hal tersebut dapat

tercermin pada capaian sasaran strategis tahun 2020 dari DP3AP2 *Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak* yang diukur dengan indikator *Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak* (Rasio) tercapai 0,52 dari target 0,46 (tercapai 86,96%).¹ Meningkatnya kasus ini diperkirakan sebagai,

dampak pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat mengalami berbagai permasalahan misalnya kebijakan Work From Home (WFH), School From Home (SFH), berkurangnya penghasilan akibat Pemutusan HK dll sehingga menambah stresor yang bisa memicu munculnya perilaku kekerasan. Pemasangan target yang terlalu optimis juga menjadi salah faktor sulitnya mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut BPS: Sepertiga dari jumlah penduduk perempuan dan anak pernah mengalami kekerasan (fisik, verbal, eksploitasi dan sebagainya).

Sumber: Raport Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk s/d TW IV, 2020. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data-data peningkatan kasus kekerasan yang cenderung meningkat signifikan tersebut diperoleh dari berbagai pihak yang melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan termasuk LSM dan yang lainnya, kemudian ditindaklanjuti melalui forum FPKK yang menangani kasus-kasus kekerasan dan advokasi (narasumber). Analisa yang dilakukan DP3AP2 bersama Lembaga Swadaya Masyarakat, mencatat kondisi kenaikan kasus-kasus kekerasan tersebut juga berkaitan dengan kesehatan mental (narasumber). Rumah tangga selama pandemi mengalami kenaikan stress dan konflik di dalam rumah, 37,5% terjadi konflik perempuan dengan pasangan dan 23,5% berkonflik dengan anak (UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU, 2021). Untuk rumah tangga yang dipimpin pria, pertengkaran dengan pasangan lebih sering terjadi (39,4%), sementara untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan lebih banyak konflik ibu dan anak (36,1%; (UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU, 2021). Berdasar dari data yang ada tersebut menurut DP3AP2 (narasumber), pandemi memicu meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masalah kekerasan juga berkaitan dengan banyak hal, antara lain aspek ekonomi (narasumber). Hal tersebut diperkuat oleh

¹ Selengkapnya dapat dilihat pada Raport Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk s/d TW IV, 2020. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi jumlah penduduk

studi dari UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU (2021) bahwa sebagian besar ibu (71,5%) di Indonesia memiliki beban ganda dalam rumah tangga selama pandemi untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu, sebagai pendamping anak yang sekolah di rumah dan mencari nafkah dibanding peran ayah.

4.1.1.6 Keistimewaan DIY

Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 berdampak pada pelaksanaan urusan Keistimewaan. Secara umum pencapaian serapan anggaran Belanja Dana Keistimewaan mencapai optimal sebesar Rp1.279.572.655.079,63 (96,94%) dari total pagu Rp1.320.000.000.000,00 (LKPJ 2020). Meskipun dari sisi belanja optimal, terdapat indikator kinerja sasaran Pemda yang didukung belanja Dana Keistimewaan terkait kewenangan Pertanahan yaitu Bidang Tanah Kesultanan, Kadipaten, dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan sebanyak 12.437 bidang dari 13.419 bidang (92,68%). Adapun 4 kewenangan Keistimewaan DIY memiliki kinerja sasaran pada indikator (LKPJ, 2020),

- 1) Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi (tercapai 102,13%) untuk kewenangan Kebudayaan
- 2) Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan (tercapai 100%) untuk kewenangan Tata Ruang
- 3) Persentase capaian program urusan keistimewaan untuk Kewenangan Kelembagaan dan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

4.1.1.7 Kebudayaan

Capaian pembangunan kebudayaan DIY secara makro relatif tercapai dengan melihat kinerja indikator Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi tercapai 102,13% ²(LKPJ 2020) selama Pandemi tahun 2020. Akan tetapi

² LKPJ Gubernur DIY Tahun 2020. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

pada level pelaksanaan program/ kegiatan urusan Kebudayaan terdampak karena Pandemi. Menurut Dinas Kebudayaan (narasumber), permasalahan yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan di DIY adalah dengan adanya pembatasan untuk kerumunan banyak dan berdampak pada berbagai kegiatan yang tertunda. Data sejumlah kegiatan yang tidak tuntas diselesaikan oleh Dinas Kebudayaan dalam rangka memfasilitasi kegiatan seni dan budaya dapat dilihat pada lampiran 1.

Kegiatan dalam rangka melestarikan budaya benda cagar budaya relatif tidak terpengaruh Pandemi karena kegiatan pemeliharaan dan renovasi masih berjalan (narasumber). Penerapan adaptasi dan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat membuat beberapa kegiatan kebudayaan yang mengumpulkan massa tertunda (narasumber), dirubah desain pelaksanaan kegiatan semula luring (luar jaringan) kemudian berubah menjadi daring (dalam jaringan/*online*). Dampak yang paling dirasakan pada sektor kebudayaan berhentinya aktivitas seni budaya yang merupakan magnet ekonomi (narasumber). Sebelum Pandemi, kegiatan-kegiatan seni budaya magnet ekonomi yang mampu menggerakkan aktivitas perekonomian miliaran rupiah antara lain Festival Kebudayaan Yogyakarta (dahulu Festival Kesenian Yogyakarta), Pasar Kangen, Sekaten hingga Bekakak (narasumber). Festival-festival budaya tersebut selalu mendatangkan dipenuhi pengunjung, pelaku UMKM maupun pedagang (narasumber).

Sejak Pandemi, pembatasan aktivitas masyarakat memaksa terjadinya perubahan konsep kegiatan ke dalam bentuk daring juga menyebabkan timbulan kegiatan ekonomi tersebut sulit diadakan (narasumber), dan banyak kelompok seni budaya yang tidak siap dengan konsep baru tersebut sehingga fasilitasi urung dilaksanakan. Beberapa upacara adat masih dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya oleh pemangku adat meskipun tidak dapat dikunjungi banyak orang. Menurut Dinas Kebudayaan (narasumber), terdapat fenomena pelaku seni dan budaya lebih tertekan karena tidak bisa berkarya dan harus tetap dirumah selama pembatasan.

Kondisi yang dialami oleh para pelaku seni budaya tersebut, sesuai kajian WHO maupun penelitian di Indonesia (Agung 2020; Kaligis, 2020) bahwa individu mengalami tekanan mental, kebingungan, ketakutan psikis, dan terlibat dalam kepanikan massal yang meningkat selama masa Pandemi karena disebabkan oleh *miss*-informasi, ketidakpastian dan perasaan takut terhadap penularan Covid-19. Kajian WHO (2020) menyatakan dampak psikologis, sosial dan ekonomi merupakan ikutan dari karantina, isolasi mandiri dan kebijakan pembatasan sosial (seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), atau *lockdown*) Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selama PPKM, seniman di DIY semakin terasa berat karena *job* untuk kegiatan resepsi (perayaan) dan pentas benar benar berhenti (narasumber).

4.1.1.8 Pelayanan Sosial

Pandemi Covid-19 juga berdampak pada masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak terutama yang terlantar. Layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di balai/panti milik Dinas Sosial DIY menjadi terganggu karena beberapa petugas dan klien terinfeksi virus Covid-19.

4.1.2 Ekonomi

Dampak Pandemi Covid-19 di bidang ekonomi dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi DIY pada sektor utama PDRB tahun 2020 mencatatkan nilai minus kecuali sektor kesehatan, informasi dan komunikasi, dan pertanian. Pada triwulan II 2020 dari sisi lapangan usaha, sebagian besar kategori tumbuh negatif pada kategori jasa lainnya yaitu -42,75 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum -39,34 persen, transportasi dan pergudangan -34,30 persen, dan konstruksi -22,18 persen. Meskipun demikian, beberapa lapangan usaha masih mampu tumbuh cukup tinggi, yaitu informasi dan komunikasi 20,74 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,91 persen, dan pertanian sebesar 10,06 persen. Dari sisi pengeluaran, semua komponen pengeluaran mengalami kontraksi. Andil terbesar terjadinya kontraksi pertumbuhan

ekonomi DIY triwulan II-2020 diberikan oleh penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar -3,79 persen, diikuti oleh konstruksi -2,38 persen, transportasi dan pergudangan -1,81 persen, jasa lainnya -1,18 persen, dan industri pengolahan -0,96 persen. Dari sisi pengeluaran, terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi terutama disumbangkan oleh pembentukan modal tetap bruto yaitu sebesar -5,42 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga -3,31 persen, dan ekspor luar negeri -1,78 persen. Sementara itu, kontraksi pertumbuhan ekonomi terhadap triwulan sebelumnya penyumbang terbesar adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan, dan jasa lainnya, masing-masing sebesar -3,51 persen, -1,44 persen, dan -1,10 persen.

Kebijakan ekonomi makro yang dijalankan yaitu menjadikan sektor kesehatan sebagai *leading sector* serta menjaga agar daya beli masyarakat tidak menurun drastis dengan mengurangi beban pengeluaran. Kebijakan ekonomi mikro yang dapat dilakukan adalah penguatan sektor-sektor ekonomi basis yang dapat secara langsung meningkatkan taraf ekonomi tanpa perlu adanya *added value* yang rumit. Misalnya sektor pertanian yang dapat dilakukan di lahan sempit atau industri kecil (*packaging* makanan kecil), dukungan biaya kirim dan dukungan pemasaran industri kecil dan UMKM.

4.1.2.1 Sektor Pariwisata

Salah satu sektor ekonomi yang terdampak berat adalah pariwisata. Semua kegiatan kepariwisataan secara resmi berhenti pada saat penerapan PPKM karena berpotensi menimbulkan kerumunan dan dapat menciptakan klaster baru. Dalam rangka pengendalian Pandemi Covid-19 untuk pemulihan ekonomi dan reaktivasi pariwisata perlu disusun Covid-19 *response plan* dengan vaksinasi sebagai *game changer*. Saat ini masyarakat Indonesia maupun dunia masih lebih mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan daripada rekreasi. Sehingga dalam jangka pendek yang diperlukan oleh pelaku wisata adalah *survivability* dengan berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sekaligus akan menjadi pondasi membangun pariwisata di masa depan dalam

jangka panjang. Pemberian bantuan untuk bertahan memenuhi kebutuhan hidup hanya merupakan insentif yang bersifat sementara. Namun untuk jangka panjang tetap perlu disiapkan langkah-langkah untuk menciptakan pola pergerakan yang aman, karena kunci utama pariwisata adalah adanya pergerakan manusia. Hal ini perlu dilakukan karena pariwisata merupakan sumber utama devisa negara di masa depan, mengingat kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor minyak bumi dan batubara. Negara-negara di dunia saat ini lebih mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini disebabkan adanya degradasi lingkungan dan berbagai efek pemanasan global yang dialami bumi saat ini.

Temuan di lapangan terkait tantangan dan permasalahan selama pandemi terungkap dari *sharing* pengalaman pelaku wisata. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata DIY mengungkapkan anggotanya harus melakukan efisiensi, hingga perumahan karyawan untuk mengurangi biaya operasional. Meskipun usaha berhenti namun tagihan listrik, air, telepon tetap harus dibayar sehingga dirasa sangat memberatkan. Beberapa kebijakan yang dilakukan Pemda DIY dirasa cukup baik namun belum solutif dan aplikatif untuk mengatasi dampak Pandemi terhadap perusahaan. Perlu adanya sinergisitas kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah sehingga tidak terjadi kebijakan yang saling bertentangan. Pemerintah diharapkan dapat menghidupkan usaha dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas sehingga perusahaan perjalanan wisata tetap memperoleh pendapatan. Selain itu, untuk perusahaan diharapkan ada bantuan berupa proyek dari pemerintah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh PHRI (Perhimpunan Hotel dan Indonesia). Kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan hotel tidak dapat menutup biaya operasional, seperti: hutang bank, tagihan listrik, dan gaji karyawan. Di lain pihak kebijakan yang dilakukan pemerintah dipandang sangat tidak berpihak pada pengusaha hotel di DIY. Bantuan yang diberikan kepada pegawai hotel tidak merata dan jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka harus melakukan pekerjaan yang lain untuk menyambung hidup. Hotel

terpaksa menjual jasa dan produk makanan selain kamar untuk menyambung kelangsungan hidup usaha dan karyawannya. Hotel sempat mengajukan surat permohonan keringanan pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, namun tidak dikabulkan, hanya memberikan penundaan pembayaran. Padahal kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk membayar pajak. Selain itu, jika ingin melakukan penghematan listrik dengan mengajukan surat kepada PLN, hal itu tidak dimungkinkan. PLN tetap membebani dengan keharusan membayar biaya beban minimum. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat, diharapkan ada solusi lain seperti bantuan sosial dalam bentuk finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pegawai hotel dan keluarganya. Karena selama ini tidak semua pegawai hotel menerima bantuan yang berupa sembako maupun beras.

4.1.2.2 Koperasi dan UMKM

Kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat Pandemi Covid-19 ikut berimbas pada pelaku UMKM di DIY. Dinas Koperasi dan UMKM DIY mengkonfirmasi bahwa selama pandemi terjadi penurunan penjualan dan pendapatan para pelaku UMKM sebagai akibat menurunnya daya beli masyarakat. Hasil penelitian Sugiarti et.al (2020) menemukan bahwa ketidakstabilan ekonomi Pandemi Covid-19 menyebabkan UMKM mengalami penurunan pendapatan hingga kebangkrutan. Soetjipto (2020) melaporkan bahwa 75% UMKM mengalami penurunan penjualan kemudian 51% UMKM hanya mampu bertahan 1-3 bulan, 67% menginginkan adanya dana darurat, dan hanya 13% pelaku UMKM yakin menghadapi situasi pandemi. Soetjipto (2020) menjelaskan penurunan omset karena daya beli konsumen menurun, kekhawatiran konsumen karena aturan PPKM dan perubahan jam operasional UMKM. Kebijakan PPKM yang menyebabkan penurunan mobilitas berdampak berat untuk UMKM di sektor pariwisata seperti pedagang cinderamata, kerajinan, produk fashion, makanan oleh-oleh di lokasi wisata, para pedagang di pusat perbelanjaan yang harus tutup selama PPKM, dan pengusaha jasa akomodasi wisata.

Dinas Koperasi dan UMKM DIY menjelaskan bahwa pada kondisi tersebut strategi yang diambil UMKM agar bertahan

adalah dengan mengalihkan kegiatan penjualan secara daring lewat sejumlah media sosial. Peralihan tersebut tidak mudah sebab banyak UMKM belum memahami pemasaran digital mulai dari teknik foto, desain konten iklan dan promosi hingga keluwesan dalam menggunakan platform digital. Dengan demikian dampak pandemi memunculkan urgensi kebutuhan UMKM untuk dapat beralih dari penjualan konvensional ke daring. Proses transformasi menuju daring tersebut akan menjadi penentu keberlanjutan usaha UMKM. Arianto, (2020) menegaskan bahwa pengembangan UMKM digital di masa pandemi Covid-19 merupakan alternatif penyelamatan sektor UMKM agar tetap eksis bahkan berdaya saing di pasar Internasional.

4.1.2.3 Ketenagakerjaan

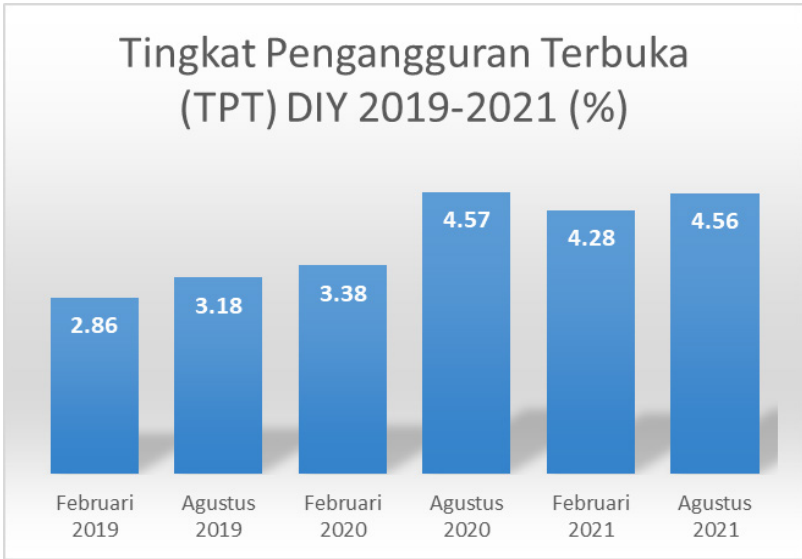
Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh selama pandemi covid-19. Pengaruh yang paling utama adalah pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan bisnis atau usaha yang mempekerjakan tenaga kerja mengalami kebangkrutan atau penurunan pendapatan. Selain itu, pada sektor ketenagakerjaan juga terjadi perubahan pengaturan sistem kerja karena pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah yang mengharuskan penerapan bekerja dari rumah atau *work from home* (wfh). Penerapan sistem *work from home* di satu sisi dapat berpotensi menurunkan produktivitas pekerja atau kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Di DIY, dampak utama dari pandemi covid-19 pada tenaga kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Pengurangan jam kerja
- Dirumahkan tanpa menerima upah atau dirumahkan dengan upah sebagian
- Pengurangan upah pekerja
- Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja menjadi dampak yang paling buruk yang dapat terjadi di sektor ketenagakerjaan. Secara makro, pemutusan hubungan kerja dapat meningkatkan angka pengangguran dan secara umum dan menurunkan produktivitas

ekonomi suatu wilayah. Pada level mikro, pemutusan hubungan kerja dapat menurunkan pendapatan rumah tangga yang berakibat pada penurunan kesejahteraan, atau bahkan mengakibatkan rumah tangga masuk ke dalam jerat kemiskinan. Untuk mendapatkan gambaran akibat pemutusan hubungan kerja, berikut data tingkat pengangguran di DIY tahun 2019 hingga tahun 2021 :



Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY 2019-2021
Sumber : BPS, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada Februari 2019, TPT DIY sebesar 2,86%, dan mengalami kenaikan pada Agustus 2019 menjadi 3,18%. Kenaikan yang cukup tajam terjadi pada Agustus 2020, yaitu 3,38% menjadi 4,57%, dan pada Agustus 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY adalah sebesar 4,56%.

4.1.2.4 Pertanian

Indikator Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk sektor pertanian tahun 2020 menunjukkan laju pertumbuhan 4,19% dibanding Tahun 2019. Kondisi tersebut berbeda dengan sektor lain yang mengalami penurunan, secara kompilasi PDRB harga konstan DIY tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami

penurunan sebesar -2,68%. Nilai PDRB pertanian selama Pandemi menunjukkan kenaikan namun sayangnya tidak linier untuk kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) rata rata semakin menurun selama Pandemi. NTP rata rata Tahun 2019 sebesar 102,56, di Tahun 2020 turun menjadi 101,13 dan di tahun 2021 (Januari sd September) makin menurun menjadi 97,30. Nilai NTP kurang dari 100 artinya petani mengalami defisit karena kenaikan harga yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Penurunan tingkat kesejahteraan petani dapat berimplikasi peningkatan angka kemiskinan di pedesaan dan ketimpangan daerah.

Hasil konfirmasi dengan Dinas Pertanian DIY, dampak Pandemi Covid-19 terhadap sektor pertanian DIY tidak seberat sektor lain semisal pariwisata, akomodasi dan transportasi. Hal ini terlihat dimana kegiatan produksi pertanian masih aktif berjalan. Dampak yang terasa adalah melambatnya penyerapan hasil panen karena menurunnya permintaan pasar dari kegiatan industri hotel, restoran dan pariwisata. Kondisi diatas secara ekonomi dapat dimaknai sebagai bentuk permintaan menurun namun penawaran berlebih akibatnya harga diterima petani menurun. Temuan ini mengkonfirmasi dua indikator diatas bahwa PDRB tumbuh (kegiatan ekonomi berjalan) namun NTP menurun.

4.1.2.5 Penanaman Modal

Salah satu dampak Pandemi Covid-19 adalah urgensi kebutuhan akan teknologi informasi di berbagai sektor. Pada masa Pandemi muncul asumsi bahwa tanpa adopsi teknologi informasi maka sektor usaha akan mengalami ketertinggalan bahkan kegagalan. Menkominfo Johnny G Plate. dalam sambutannya saat membuka kegiatan *Startup Weekend Covid-19* menyampaikan bahwa Pandemi ini memberi ruang yang besar bagi pegiat *startup* untuk berinovasi. Johnny G Plate menaruh harapan kepada *startup* tetap membangun dengan semangat yang tinggi untuk menghasilkan inovasi baru. Temuan menarik dari dampak Pandemi terdapat delapan sektor usaha yang mengalami peningkatan dan berpotensi untuk menjadi wadah penanaman modal di masa *new normal*. Delapan sektor usaha tersebut ialah

E-commerce, Health Tech, Edutech, Fintech, Logistic, Big Data, Teleworking, dan Entertainment.

E-Commerce semacam Bukalapak, Tokopedia dan Shopee mengalami pertumbuhan 30%. peningkatan ini terjadi karena aktivitas masyarakat untuk keluar rumah dibatasi, sehingga waktu yang dihabiskan didalam rumah dan meningkatkan transaksi dalam *e-commerce*. Hal sama juga dialami Inagri dan Tani hub. Pandemi mendorong peningkatan permintaan produk pertanian karena konsumen menghindari pasar yang merupakan lokasi rawan penularan. *Health Tech* yaitu aplikasi layanan kesehatan diduga mengalami pertumbuhan hingga 100%, karena masyarakat menghindari rumah sakit yang rawan penularan dan keterbatasan pelayanan kesehatan. *Health tech, Halo doc* dan *Good Doctor* menyediakan layanan dengan fitur konsultasi daring dan dapat memesan obat langsung. Selain kebutuhan konsultasi, ada *startup* yang menghadirkan fitur pelayanan rawat jalan seperti *Lamesia*. *Startup* ini berkerjasama dengan para perawat professional sehingga kebutuhan rawat jalan tetap bisa dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan. *Edu Tech* semacam *Skill Academy, Kiddo.id* dan *ScolaLMS* menyediakan layanan pelatihan, platform pendidikan dan layanan *study from home*. *Finnotech*, layanan pinjaman keuangan untuk sektor produktif misalnya *IDV Venture* untuk pendanaan bagi UMKM.

Selanjutnya layanan logistik yang meningkat seiring *e-commerce*, semisal Paxe sebuah layanan makanan dan minuman dengan fasilitas pendingin dan menjamin pengiriman dalam satu hari atau 24 jam sangat diminati oleh pengusaha makanan dan minuman yang produknya tidak tahan lama. *Big Data* sebuah layanan untuk mendukung kinerja karyawan perusahaan yang dilakukan dari rumah. Layanan *big data* akan mendukung keamanan dan kelancaran transfer dan pengelolaan data perusahaan. *Startup* di bidang ini misalnya Delma dan Bozna. *Teleworking* yaitu layanan *video conference* semisal Zoom yang selama Pandemi menjadi alternatif komunikasi. Layanan tersebut sukses menjual akun berbayarnya. Terakhir adalah *entertainment*, layanan hiburan semisal Netflix,

Viu dan Disney Channel mendapat keuntungan besar karena menjadi alternatif hiburan dan menghabiskan waktu selama berkegiatan di rumah.

4.1.2.6 Perhubungan

Dampak Pandemi Covid-19 yang kentara dan menimbulkan sejumlah keluhan dari Masyarakat adalah pembatasan perjalanan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mereduksi penularan Covid-19. Pembatasan dilakukan di titik titik masuk wilayah DIY yaitu pos Prambanan di perbatasan dengan Klaten, pos Tempel di perbatasan dengan Magelang dan pos Temon yang berbatasan Purworejo. Kegiatan pembatasan mendapat sejumlah hambatan antara lain : belum ada mekanisme karantina terhadap pendatang yg terindikasi sakit, suhu tubuh tinggi, maupun penumpang dari zona merah dan praktik penindakan yang tidak seragam dari pos sebelumnya sehingga menjadi bahan argumen bagi pengguna jalan untuk minta diloloskan. Situasi penindakan yang umum dijumpai selama pembatasan adalah pemberlakuan putar balik kendaraan.

Dinas Perhubungan DIY mencatat kebijakan pembatasan berhasil menurunkan volume kendaraan yang masuk di DIY. Indikator penurunan volume kendaraan tersebut teramati dari jumlah antrian simpang, jumlah bus dan penumpang, jumlah kendaraan di TKP (Tempat Khusus Parkir), jumlah penumpang di moda transportasi. Tingkat penurunan panjang antrian simpang dibandingkan sebelum PPKM darurat di wilayah DIY adalah sebagai berikut; Kabupaten Sleman sebesar 46%; Kabupaten Bantul 39%; Kota Yogyakarta 41% dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 34%. Penurunan jumlah kendaraan parkir di TKP (Tempat Khusus Parkir) Bandara sebesar 23% dan TKP Beskalan 21 %. Penurunan jumlah penumpang trans jogja 14 %, KRL Jogja Solo 26%, KA Prameks 19%, penumpang bandara YIA 28 %. Penurunan jumlah pesawat bandara YIA 27 %. Terakhir tingkat penurunan kedatangan dan keberangkatan jumlah bus dan penumpang di sejumlah terminal di DIY seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Tingkat Penurunan Kedatangan dan Keberangkatan Di Terminal DIY (Juni-September 2021)

No	Nama Terminal	Tingkat Jumlah Penurunan (%)	
		Bus	Penumpang
1	Terminal Daksinarga bus AKAP	9	15
2	Terminal Daksinarga bus AKDP	15	15
3	Terminal Giwangan bus AKAP	12	11
4	Terminal Giwangan bus AKDP	14	14
5	Terminal Jombor bus AKAP	14	14
6	Terminal Jombor bus AKDP	15	16
7	Terminal Wates bus AKAP	14	15
8	Terminal Wates bus AKDP	82	82

Pembatasan diatas juga efektif untuk mengurangi jumlah pemudik dari luar provinsi. Kondisi ini terlihat asal kendaraan yang di sejumlah pos perbatasan didominasi oleh pemudik komuter. Dari data Dinas Perhubungan DIY jumlah asal pemudik dari Jabodetabek relatif sedikit. Pos perbatasan Prambanan mencatat hanya ada 4,56% dari seluruh pemudik, berikutnya pos Tempel 7,63% dan pos Temon 3,76%.

4.2 Program Penanganan COVID-19

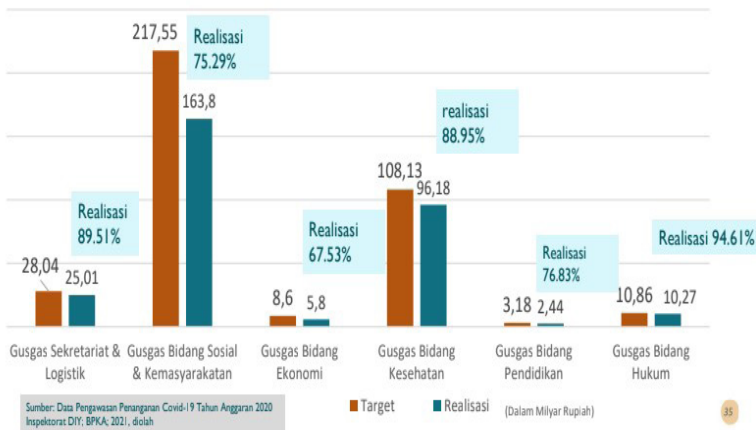
Sejak ancaman pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) masuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) awal Maret 2020, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah memberikan arahan melalui Surat Instruksi Gubernur DIY Nomor 2/Instr./2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19). Surat Instruksi tersebut menjadi dasar penanganan epidemi COVID-19 di wilayah DIY. Instruksi tersebut memerintahkan OPD DIY -Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY bersama Dinas Kesehatan, dan segenap OPD- bekerja bersama TNI/Polri dan Rumah Sakit untuk segera menyusun rencana kontinjensi.

Rencana kontinjensi tersebut menindaklanjuti peningkatan kasus dan korban yang diwujudkan dalam Rencana Operasi Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di DIY. Rencana operasi tersebut menjadi panduan bagi Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DIY yang dibentuk oleh Gubernur DIY. Gugus Tugas tersebut terdiri dari unsur pimpinan Pemerintah Daerah, Pemerintah, TNI/ Polri, Akademisi dan stakeholder terkait.

Rencana operasi tersebut mempertimbangkan skenario dalam mengantisipasi kondisi terburuk, terutama lonjakan kasus yang sangat mungkin jauh diatas kapasitas pemerintah dan masyarakat, serta durasi pandemi yang panjang.

Rencana Operasi Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di DIY menjadi panduan operasional komprehensif untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, jatuhnya korban dan dampak sosial ekonomi bagi warga masyarakat. Rencana Operasi tahun 2020 tersebut memiliki empat sasaran yaitu

- 1) tercegahnya penyebaran dengan cepat dan tepat,
- 2) pasien covid-19 tertangani hingga sehat dan tuntas,
- 3) terwujudnya ketangguhan sosial, ekonomi, dan pendidikan serta
- 4) terjaminnya keterbukaan, kejelasan, kemudahan, partisipasi dan literasi informasi kepada warga DIY.



Gambar 4. Kinerja Pelaksanaan BTT Pemda DIY Tahun Anggaran 2020

Sumber: BPKA DIY, 2021 (diolah)

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan program/kegiatan penanganan Covid-19 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp422.487.000.000,00 dengan fokus realokasi anggaran kesehatan, sosial dan ekonomi. Alokasi tersebut direncanakan melalui Rencana Operasi yang dilaksanakan dalam 2 tahap dan 15 fase usulan pada tahap ke-2.

Anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut telah terealisasi sebesar Rp305.639.000.000,00 atau 72,34% (Pidato Gubernur DIY, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020) dengan deskripsi persentase realisasi sebagai berikut :

Pada tahun 2021 (s.d 31 Agustus 2021), Pemerintah Daerah DIY mengalokasikan penanganan Covid-19 dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp418.346.430.577,00 yang terdiri dari Rp320.148.499.521,00 pada anggaran belanja barang/ jasa program/ kegiatan regular dan Rp98.197.931.056,00 pada anggaran belanja tidak terduga. Alokasi anggaran dilaksanakan pada prioritas sebagai berikut

1. PRIORITAS I - PENANGANAN KESEHATAN:
Rp207.449.268.877,00
2. PRIORITAS II - PENANGANAN DAMPAK EKONOMI:
Rp142.011.025.700,00
3. PRIORITAS III - PENYEDIAAN SOCIAL SAFETY NET:
Rp68.886.136.000,00

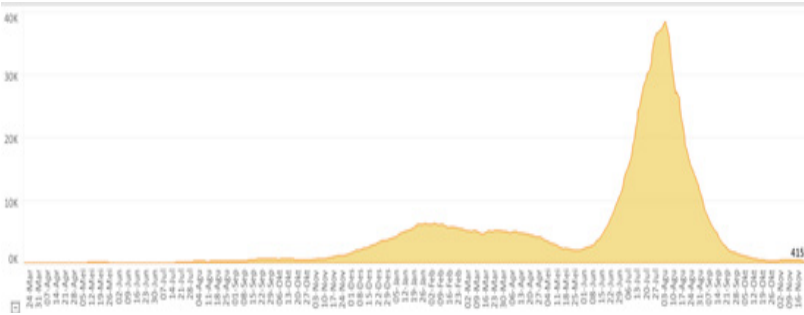
Alokasi terbesar digunakan untuk penanganan kesehatan sebagaimana tergambar sebagai berikut,



Gambar 5. Proporsi Prioritas Penanganan Covid-19 Pemda DIY Tahun 2021 (s.d 31 Agustus 2021)

Proporsi prioritas tersebut mengikuti kebijakan nasional dan prioritas daerah pada RKPD dan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 yang telah mengalami beberapa kali refokusing anggaran sesuai

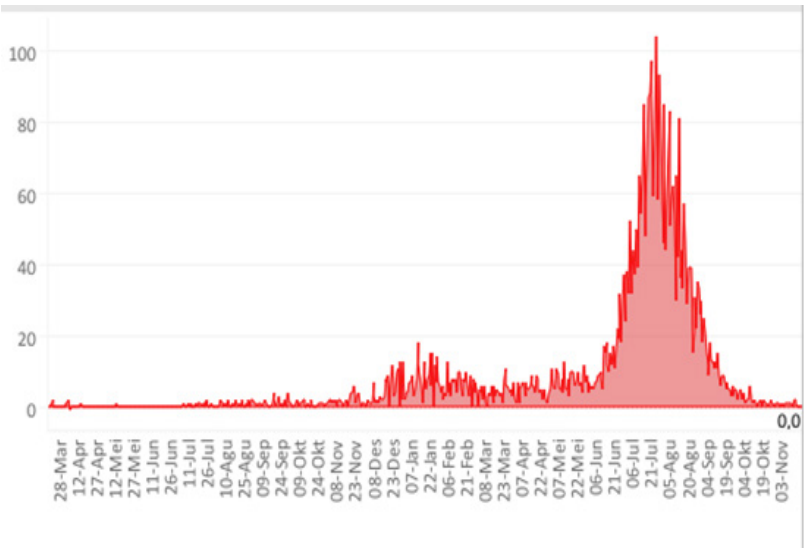
dengan peraturan perundangan yang berlaku (melalui Peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya) dalam rangka percepatan penanganan. Penanganan kesehatan menjadi prioritas utama mengingat dinamika kasus pada tahun 2021 meningkat secara eksponensial yang dapat dilihat pada grafik sebagai berikut,



Gambar 6. Tren Kasus Positif di DIY 2020-2021

Sumber: <https://corona.jogjapro.go.id/data-statistik> (November 2021)

Kenaikan kasus pada akhir triwulan II sampai dengan triwulan III tersebut diikuti dengan meningkatnya tren korban meninggal pada kuartal tersebut sebagaimana digambarkan sebagai berikut,



Gambar 7. Tren Harian Meninggal Kasus Positif di DIY 2020-2021

Sumber: <https://corona.jogjapro.go.id/data-statistik> (November 2021)

Sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia (2021) bahwa pemulihan kesehatan melalui upaya peningkatan kesehatan,

pelaksanaan protokol kesehatan dan upaya vaksinasi sebagai *game changer* menggambarkan bagaimana prioritas kesehatan menjadi panglima dalam rangka meminimalkan korban jiwa dan meningkatkan optimisme aktivitas perekonomian secara luas. Selain pemulihan kesehatan, Bank Indonesia (2021) juga menyarankan belanja fiskal (anggaran pemerintah) yang dilaksanakan secara efektif. Oleh karenanya program pemulihan dari aspek kesehatan, sosial ekonomi perlu didukung dengan implementasi yang efektif dan efisien baik dari belanja program/kegiatan reguler maupun belanja tidak terduga.

4.2.1 Sosial

4.2.1.1 Kesehatan

Program Kegiatan atau upaya penanganan Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Upaya tersebut terkait dengan penguatan layanan baik pelaksanaan *tracing, testing, treatment* (3T) maupun percepatan cakupan vaksinasi. Pelaksanaan 3T dimaksudkan untuk menemukan secepatnya orang yang dimungkinkan terpapar oleh orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, secepatnya melakukan pengetesan, dan memberikan perawatan bagi yang terkonfirmasi positif, sedangkan percepatan cakupan vaksinasi dimaksudkan untuk menciptakan *herd immunity*. Berdasarkan data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 cakupan vaksinasi di DIY mencapai 90,8% untuk dosis 1 dan 65,3% untuk dosis 2 dengan sasaran SDM kesehatan, pelayan publik, lansia, masyarakat umum dan rentan, dan remaja. Percepatan perluasan cakupan vaksinasi terus dilakukan dengan harapan sampai dengan akhir tahun 2021 cakupan dosis 1 mencapai 100% dan di triwulan I tahun 2022 cakupan dosis 2 mencapai 100%. Upaya percepatan cakupan dilakukan dengan “jemput bola” terutama untuk wilayah dan sasaran yang kesulitan akses vaksinasi seperti daerah pinggiran DIY dan dengan prioritas sasaran lansia. Selanjutnya dari sisi promotif preventif, upaya promosi dan KIE terus dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan protokol

kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas).

4.2.1.2 Kebencanaan

Badan Penanganan Bencana Daerah DIY (BPBD DIY) mengkonfirmasi bahwa pengalaman penanganan Pandemi Covid-19 mendorong perlu adanya modifikasi dan adaptasi untuk kesiapsiagaan bencana yang selama ini lebih cenderung ke arah bencana alam. Bentuk modifikasi yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan kegiatan BPBD selama Pandemi kedalam program Destana (Desa Tangguh Bencana). Kegiatan yang telah dilakukan antara lain dukungan operasional, peralatan dan kesehatan untuk tim siaga/satgas desa atau FPRB Desa merespon beragam krisis dari dampak Pandemi Covid-19. Pelatihan tim siaga atau satgas atau FPRB Desa, program konsultasi isolasi mandiri untuk pengobatan dan rawat rumah, peminjaman tabung oksigen dan bantuan suplemen, makanan bergizi dan sembako. Dari sisi kebijakan saat ini BPBD DIY sedang menyiapkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

4.2.1.3 Ketertiban Sosial

Satpol PP mengkonfirmasi bahwa kondisi lapangan untuk penegakan pembatasan sosial bervariasi dan dinamis. Situasi sulit dijumpai untuk kasus yang berkaitan dengan ekonomi misalnya warung makan, kafe, toko dan tempat wisata. Pelaku ekonomi tersebut ada yang kooperatif namun ada yang agresif dan defensif. Inovasi yang dilakukan Satpol PP untuk merespon dinamika di lapangan tersebut dengan mengoptimalkan peran dan kinerja forum komunikasi di aplikasi *WhatsApp*. Forum tersebut beranggotakan TNI, Polri, Satpol PP antar wilayah dan Humas Pemda DIY yang bekerja secara grup dan shift sehingga menjaga ketersediaan SDM untuk merespon aduan. Forum komunikasi mengedepankan koordinasi dan aksi bersama untuk pengaduan dan pelanggaran Prokes. Mekanisme komunikasi terbukti efektif untuk penegakan Prokes terkhusus untuk pelanggar yang bersifat defensif dan agresif.

4.2.1.4 Pendidikan

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 DI Yogyakarta di Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta (Dikpora DIY). Satgas bidang pendidikan memiliki tugas antara lain; 1) Menetapkan kebijakan dan regulasi penanganan Covid-19 di bidang pendidikan sesuai perkembangan, termasuk berkaitan dengan protocol kesehatan, adaptasi kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian/ujian dan tindaklanjut; 2) Meningkatkan kesiapan infrastruktur dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran jarak jauh; 3) Meningkatkan kesiapan satuan pendidikan/perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan protokol kesehatan, seperti ketersediaan SOP pembelajaran, penataan sarana dan prasarana dan lingkungan, dll; 3) Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor (Kemenag, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota) dan instansi Vertikal. Tugas lain dliuar. Tugas non kebijakan yang dilakukan antara lain Sterilisasi / Penyemprotan *Disinfectan* dilakukan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri dan Swasta se-Daerah Istimewa Yogyakarta; Penyediaan Sistem verifikasi Berkas PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) secara daring/*online* dan Pengadaan APD (alat pelindung diri) untuk sekolah dalam pelaksanaan pendidikan di era *new normal*.

Pada tahun 2020, Dikpora DIY melaksanakan penanganan Covid-19 melalui kegiatan pembelajaran daring dengan pagu total Rp798.505.000 yang dipergunakan untuk: Kajian Pembelajaran Digital sebanyak 1 kajian, Siaran JB Radio sebanyak 10 kali, Bimtek Online: 80 Sesi dari 80 sesi, Pembuatan studio JB TV streaming: 1 studio dari 1 studio, Peralatan Penunjang: 1 paket dari 1 paket (Raport Kinerja Dikpora TW IV, 2020). Pada tahun 2021 tidak terdapat kegiatan untuk publik yang spesifik dalam penanganan Covid-19, akan tetapi dalam laporan pelaksanaan kegiatan pada aplikasi Sengguh (status September; <https://sengguh.jogjapro.go.id/s2021/monev-laporan/laporan>) terrekam mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh Dikpora dalam menyiasati kendala pandemi dan PPKM. Adaptasi pelaksanaan terjadi seluruh

kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas dan UPT di bawah Dikpora yang relatif lebih siap disbanding tahun 2020.

Pada tahun 2021, Dikpora³ menjadi Koordinator Bidang Perubahan Perilaku pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DIY, dengan anggota Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kanwil Kementerian Agama, Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, Fakultas Farmasi UGM, Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, dan Balai Pelatihan Kesehatan Yogyakarta. Ketugasan Bidang Perubahan Perilaku antara lain,

1. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada Kabupaten/ Kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten/ kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas
2. Menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi
3. Memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten/ kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan media luar ruangan dengan mengacu kepada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
4. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten/ kota untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/ desa dan RT/ RW dapat berfungsi dengan baik;

³ Sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 32/ KEP/ 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/ KEP/ 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Memastikan pelaksanaan prosedur keselamatan dan Kesehatan kerja pada seluruh petugas masyarakat yang terkait dengan Covid-19;
6. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
7. Melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dan capaian bidang perubahan perilaku.

Meskipun belum ada studi/ laporan yang terlaporkan oleh Satuan Tugas , terutama oleh Dikpora sebagai koordinator terkait perubahan perilaku masyarakat terkait hasil intervensi pemerintah terhadap perilaku masyarakat dalam pandemi Covid-19 di DIY, studi yang dilaksanakan oleh BPS DIY (2021)⁴ dapat mendeskripsikan perilaku warga DIY selama PPKM Darurat sebagai berikut,

1. Kepatuhan responden terhadap protokol kesehatan secara umum sudah cukup baik. Namun, beberapa perilaku responden dalam melaksanakan protokol kesehatan masih perlu mendapatkan perhatian, seperti kurang patuh dalam menghindari kerumunan (15,6%), cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer (20,9%), dan menjaga jarak minimal 2 meter (30,3%). Namun secara umum masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta lebih patuh dibanding rata-rata nasional (sumber: publikasi yang sama oleh BPS RI)
2. Jika dibandingkan tingkat kepatuhan antara laki-laki dan perempuan maka laki-laki cenderung lebih kurang patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Masih cukup banyak responden laki-laki yang belum patuh dalam menghindari kerumunan (20,01%), cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer (27,59%), dan menjaga jarak minimal 2 meter (34,99%).
3. Sebagian besar responden menilai kepatuhan dirinya dalam menjalankan protokol kesehatan sudah cukup baik, tetapi responden menilai bahwa tingkat kepatuhan masyarakat

⁴ BPS DIY. (2021). *Perilaku Masyarakat Pada Masa PPKM Darurat D.I. Yogyakarta : Hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 13-20 Juli 2021*, Yogyakarta: BPS DIY.

sekitarnya dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah, khususnya dalam hal memakai 2 masker, cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 2 meter.

4. Sebagian besar responden mengurangi frekuensi perjalanannya selama PPKM Darurat. Responden juga menilai berbagai kegiatan di kantor, sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum pasar/warung/supermarket/mall dan sejenisnya, serta kegiatan seni budaya, sosial, keagamaan selama PPKM Darurat turun dibandingkan sebelumnya.
5. Kesadaran masyarakat dalam mengikuti program vaksinasi sudah cukup baik, tetapi masih terdapat sebagian orang yang khawatir dengan efek samping dan tidak percaya efektivitas vaksin (11% dari responden yang belum divaksin, jauh lebih baik dibanding kondisi rata-rata nasional yang sebesar 20%).
6. Mayoritas penduduk merasa jenuh/sangat jenuh selama PPKM diberlakukan (56,9% responden). Banyak responden yang mengisi kegiatan selama pembatasan melalui kegiatan yang meminimalkan mobilitas, yaitu berkomunikasi dengan keluarga/teman secara online dan memperbanyak ibadah.
7. Responden menilai pemenuhan kebutuhan pokok, obatobatan, vitamin, masker dan hand sanitizer, dan pelayanan kesehatan jika ada yang sakit relatif mudah, tetapi untuk pemenuhan alat kesehatan yang menunjang seperti oxymeter, tabung oksigen, nebulizer relatif masih sulit (39,8% responden).

(sumber : BPS DIY. (2021). Perilaku Masyarakat Pada Masa PPKM Darurat D.I. Yogyakarta : Hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 13-20 Juli 2021, Yogyakarta: BPS DIY.)

4.1.1.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penanganan Covid-19 dalam ruang lingkup urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) difokuskan terutama untuk mengatasi naiknya prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi berlangsung. Terutama berangkat dari capaian indikator *Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak* yang melebihi target ambang, yakni 0,52 dari target 0,46 (86,96%).⁵ Langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh DP3AP2 (narasumber) dengan melakukan mitigasi dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut antara lain dengan membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa (narasumber). Untuk mengefektifkan kinerjanya, DP3AP2 menyusun alur koordinasi yang dilakukan secara berjenjang dari provinsi, kabupaten hingga ke tingkat desa (narasumber). Kendala yang dihadapi adalah terkait sulitnya melakukan pendataan terhadap permasalahan kekerasan perempuan dan anak juga kendala terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lapangan (narasumber). Berkenaan dengan keterbatasan tersebut, DP3AP2 mengatasinya dengan kerjasama dengan kader-kader dan PKK (narasumber).

Menurut data yang ada (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021), pada tahun 2021 DP3AP2 mengoptimalkan Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui beberapa upaya antara lain: (1) membentuk jejaring kerja Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) mengoptimalkan Forum Data Gender dan Anak; dan (3) adanya sistem data pelaporan. Lebih lanjut untuk diantisipasi DP3AP2 adalah,

... angka kekerasan terhadap perempuan dan anak diprediksi masih tetap tinggi apabila kondisi pandemi masih terus berlanjut. Hal ini terkait dengan ketidaksiapan orang tua beradaptasi dengan perubahan rutinitas dan pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19, perubahan skema pembelajaran anak secara daring, dan tekanan ekonomi keluarga akibat pandemi COVID-19. Terkait dengan prediksi

⁵ Selengkapnya dapat dilihat pada Raport Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk s/d TW IV, 2020. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dibagi jumlah penduduk

angka kekerasan yang masih tinggi ini maka perlu penguatan upaya preventif antara lain dengan penguatan peran PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), penguatan peran masyarakat dalam menjaga masyarakat lainnya supaya tidak terjadi tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Disamping itu dukungan lintas sektor untuk membangun jejaring dengan berbagai stakeholder yang terkait dengan isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga yang selama ini telah dijalankan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY agar terus ditingkatkan. (sumber: Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021)

Dalam peran penanggulangan Covid-19 di DIY, DP3AP2 tidak hanya berperan dalam Satuan Tugas Bidang Perubahan Perilaku, DP3AP2 mengoptimalkan program/ kegiatan pada OPD tersebut⁶. Melalui program/ kegiatan OPD DP3AP2, dinas tersebut berupaya menguatkan pemberdayaan perempuan, dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak selama pandemi berlangsung. Pada tahun 2021, DP3AP2 memberikan 3 paket hibah (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021). Ketiga paket hibah tersebut yaitu (1) hibah Penguatan kelembagaan Desa PRIMA yang diberikan pada kelompok Desa PRIMA "*Sejahtera Abadi*" (Desa Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo) dan (2) Desa PRIMA "*Gumregah*" (Desa Putat, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul) pada sub kegiatan Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan serta (3) 1 paket hibah operasional Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Rekso Dyah Utami P2TPAKK RDU) DIY pada sub kegiatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021).

4.2.1.5 Keistimewaan DIY

Terdapat harapan publik, Dana Keistimewaan DIY dapat digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di DIY sejak tahun 2020. Pada Mei 2020, Pemerintah Daerah DIY berencana menggunakan Dana Keistimewaan DIY untuk mengatasi Pandemi Covid-19 sebagaimana dikutip dari Detik (11 Mei 2020)

Paniradya Pati, Beny Suharsono menyampaikan,

⁶ Sesuai Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 32/ KEP/ 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/ KEP/ 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian RI No.35/PMK/07/2020, 'Dana Keistimewaan bisa digunakan untuk menanggulangi Covid-19 dan untuk pemberdayaan masyarakat,... pada tanggal 13 Maret 2020 Paniradya sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat terkait dengan pelaporan administrasi penggunaan Danais termin pertama.

"Sebelum termin kedua bisa dicairkan, tentunya kami harus mengirimkan laporan administrasi termin pertama terlebih dahulu. Oleh karenanya, kami bersurat untuk mengirimkan pelaporan administrasinya. Lebih lanjut, kami selanjutnya tinggal menunggu verifikasi dari pusat"

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional mengatur penggunaan Dana Keistimewaan untuk penanganan Covid-19 pada pasal 24 ayat (1) dan (2) bahwa,

- 1) Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan Keistimewaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19
- 2) Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Keistimewaan tahun anggaran berjalan, Gubernur DIY menyampaikan laporan atas perubahan program dan kegiatan Dana Keistimewaan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perubahan program dan kegiatan disusun.

Menurut Paniradya Kaistimewaan (narasumber), secara efektif, Dana Keistimewaan tidak dapat digunakan untuk penanganan/ pemulihan Pandemi Covid-19 di DIY. Kegiatan *refocussing* Dana Keistimewaan banyak untuk kegiatan urusan kebudayaan.

⁷ Detik. 11 Mei 2021. *Pemda DIY Akan Pakai Danais untuk Atasi Pandemi COVID-19*. Selengkapny pada <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5010924/pemda-diy-akan-pakai-danais-untuk-atasi-pandemi-covid-19>. Diakses 1 September 2021.

Pada tahun 2021 Dana Keistimewaan lebih efektif digunakan untuk pemulihan sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 /PMK.07/2021⁸ (Pasal 14 A). Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 335/PMK/07/2020, Peraturan Menteri nomor 94 /PMK.07/2021 lebih eksplisit terkait batasan penanganan Covid-19 di DIY bahwa,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan/ atau penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Dana Keistimewaan dapat digunakan untuk mendanai pencegahan dan atau penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk namun tidak terbatas untuk:

- 1) Penyediaan fasilitas kebutuhan medis penanganan Pandemi *Corona Vims Disease* 2019 (Covid-19);
- 2) Pembiayaan relawan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) termasuk penyediaan mobil ambulan;
- 4) Pemberian jaminan hidup bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri di rumah; dan/ atau
- 5) Mendorong penyediaan *plasma konvalesen* untuk mempercepat penanganan Pandemi *Corona Vims Disease* 2019 (Covid-19).

Dalam praktiknya, alokasi dana keistimewaan untuk pemulihan sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 disalurkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY yang terkait penanganan Covid-19 dan sisanya dialokasikan sebagai Belanja Tak terduga. Menurut Paniradya Kaistimewan (narasumber), sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 /PMK.07/2021, pada tanggal 19 Juli 2021 Dana Keistimewaan telah digunakan untuk belanja sosial penanganan Covid-19.

⁸ Peraturan Menteri Keuangan nomor 94 /PMK.07/2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virusdisease2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

Belanja bantuan sosial tersebut diantaranya diimplementasikan oleh Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi UMKM (narasumber).

4.2.1.6 Kebudayaan

Dinas Kebudayaan pada tahun 2020 melakukan redesain pelaksanaan kegiatan dalam rangka memfasilitasi pelaku seni budaya agar keluar dari tekanan Pandemi (narasumber). Dalam kondisi pembatasan kegiatan tatap muka, peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 dan terpaparnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas maupun pelaku seni budaya selama awal Pandemi, Dinas Kebudayaan melakukan adaptasi berupa redesain, penjadwalan ulang kegiatan, dan *refocusing* anggaran (Raport Kinerja Dinas Kebudayaan, 2020). Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan timbunan kerumunan seperti Festival Kebudayaan Yogyakarta, Pembinaan Lembaga Penggiat Seni, Penghargaan Seniman dan Budayawan, Gelar Budaya Jogja dan Selendang Sutera diredisain, ditunda, didesain ulang dan beradaptasi dengan protokol kesehatan Covid-19 sesuai himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan massa (Raport Kinerja Dinas Kebudayaan, 2020).

Pada tahun 2021, adaptasi terhadap Pandemi dalam memberikan dukungan pemulihan pelaku seni budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan menggunakan anggaran program/ kegiatan APBD (dari sumber Dana Keistimewaan) melalui beberapa sub kegiatan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dengan total realisasi sebesar Rp876.601.500,00 (Raport Kinerja Dinas Kebudayaan TW I,II, III diolah). Realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

Bentuk subkegiatan yang cukup berperan penting dalam pemulihan sosial ekonomi adalah upaya vaksinasi terhadap 10.000 Pelaku seni dan Budaya yang baru terlaksana dosis 1 s/d Triwulan III. 2021. Menurut Laporan Ekonomi Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Bank Indonesia Mei 2021, vaksinasi adalah *game changer* pemulihan sosial ekonomi dalam masa Pandemi pada tahun 2021 sebagai bagian upaya

untuk mensukseskan pengendalian Pandemi Covid-19. Bank Indonesia Perwakilan DIY juga merekomendasikan belanja fiskal dari anggaran pemerintah / pemerintah daerah direalisasikan secara efektif dalam rangka pemulihan sosial ekonomi. Vaksinasi diyakini akan memberikan ekspektasi positif pada masyarakat sehingga berdampak mendorong konsumsi (BI Perwakilan Yogyakarta, Mei 2021).

Dalam memperkuat pemulihan, Dinas Kebudayaan dengan Dana Keistimewaan telah beradaptasi dan menginisiasi Pentas Seni Daring -pentas dalam jaringan (daring; *online*) untuk 130 sanggar atau perseorangan dengan biaya seluruhnya ditanggung Dinas Kebudayaan (narasumber). Kegiatan ini memberi manfaat pendapatan bagi pelaku seni dan profesi pendukung kesenian (narasumber). Dinas kebudayaan mendapat manfaat dari terdokumentasinya kegiatan seni budaya atau sebagai upaya pengarsipan seni budaya. Upaya pemulihan pelaku seni budaya oleh Dinas Kebudayaan dengan Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)⁹ dengan total anggaran sebesar Rp1,2 miliar sebagai bagian dari Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 yang direncanakan Pemerintah Daerah DIY (Laporan Penggunaan APBD Untuk Penanganan Covid-19, s/d 23 Agustus 2021). Sampai dengan Triwulan III telah terealisasi Rp200 juta. Pengenaan aplikasi berbayar tersebut juga diedukasikan/ dikenalkan kepada penonton yang berkunjung (narasumber).

Dalam mendukung pemulihan Dinas Kebudayaan mengupayakan belanja sosial untuk ribuan pelaku seni budaya yang mungkin tergabung/bagian dari 8.826 grup kesenian di DIY, 8.757 grup seni pertunjukan, 29 organisasi seni rupa, dan 968 tokoh seniman budayawan (Jogja Dataku, 2021). Dari ribuan pelaku seni budaya tersebut, hanya 300-an orang yang memiliki identitas profesi sebagai pelaku seni budaya yang terrekam dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga mungkin lebih banyak yang tidak tercakup sesuai ketentuan *by name by*

⁹ QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17 Agustus 2019.

address penerima bantuan sosial dalam rangka pemulihan sosial ekonomi Covid-19 (narasumber). Seniman umumnya melakukan *double* profesi bukan sebagai seniman penuh waktu / *full time* (narasumber). Akibatnya program penjaminan sosial yang berangkat dari data base KTP sulit mencapai target yang tepat (narasumber)

4.2.1.7 Pelayanan Sosial

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial DIY adalah terkait pemberian jaminan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak seperti pemberian bantuan sosial, pendirian *shelter* bagi masyarakat yang melakukan isolasi, dan perluasan cakupan vaksinasi bagi klien panti.

Pemberian bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan sumber anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan dana desa. Pemda DIY melalui Dinas Sosial DIY selama masa pemberlakuan PPKM telah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat terdampak dan peserta PKH yang bersumber dari Kementerian Sosial RI berupa uang tunai Rp300.000,- per orang dan bantuan beras sebesar 10 kg per orang yang penyalurnya melalui BULOG.

Realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak mencapai 100% karena adanya kendala yaitu : terdapat KPM yang sedang melakukan isoman, KPM sudah pindah alamat, meninggal dunia dan terdapat KPM yang sedang bepergian tidak bisa pulang karena adanya PPKM. Rincian target dan realisasi BST per Kabupaten/Kota dapat dilihat lampiran 4.

Pemberian bansos juga dilakukan Pemda DIY melalui Dinas Sosial DIY dengan sumber anggaran dari APBD reguler dan APBD yang berasal dari Dana Keistimewaan. Pada Tahun 2020, bansos berupa paket sembako diberikan kepada masyarakat terdampak dengan sasaran lansia terlantar yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) binaan LKS, eks warga binaan lapas, penyandang disabilitas yang ada di DTKS, dan mahasiswa luar daerah yang tinggal di asrama. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 107/KEP/2020, sasaran bansos untuk penyandang disabilitas sebanyak 375 orang, lanjut

usia terlantar sebanyak 750 orang, dan mahasiswa luar daerah yang tinggal di asrama sebanyak 464 orang dengan tambahan 665 orang dan 558 orang berdasarkan Keputusan Gubernur DIY nomor 281/KEP/2020 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 184/KEP/2020. Selain itu bansos berupa paket sembako juga diberikan kepada bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan untuk 226 orang berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 184/KEP/2020.

Sedangkan di tahun 2021, Pemda DIY melalui Dinas Sosial juga mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan untuk memberikan bansos kepada 1.734 anak yang terdampak selama 3 bulan. Anak-anak tersebut merupakan yatim, piatu, maupun yatim piatu yang ditinggal orang tuanya baik karena Covid-19 maupun non Covid-19 (www.merdeka.com).

Untuk memberikan fasilitasi bagi masyarakat yang memerlukan tempat isolasi karena terinfeksi Covid-19 tanpa gejala dan bergejala ringan, Dinas Sosial DIY mendirikan shelter dan memfasilitasi shelter-shelter yang sudah didirikan oleh Pemerintah Kapanewon/Kemantren/Kalurahan dan lembaga. Fasilitasi yang diberikan berupa makan dan minuman, toiletries, dan multivitamin. Selain shelter yang terfasilitasi dan terpantau oleh Dinas Sosial DIY, juga terdapat *shelter* dan isoter yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, hotel, dan lembaga. Sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 tercatat ada 62 *shelter* di DIY dengan daya tampung 3.744 orang (Dinas Sosial, 2021). Rincian deksripsi *shelter* dan data tampungannya dapat dilihat pada lampiran 5

Khusus untuk *shelter* yang difasilitasi oleh Dinas Sosial DIY berjumlah 62 *shelter* yang tersebar di 3 kabupaten (Sleman, Bantul, Gunungkidul) dan Kota Yogyakarta dengan daya tampung 892 orang. Rincian lokasi *shelter* tersebut dapat dilihat pada lampiran 6.

Upaya lain yang dilakukan Dinas Sosial DIY dalam mencegah penularan Covid-19 adalah penerapan protokol kesehatan di gedung pemerintahan terutama di balai/panti. Selain itu

dilakukan percepatan cakupan vaksinasi bagi klien di panti melalui kerjasama dengan puskesmas di wilayahnya. Tenaga vaksinator melakukan vaksinasi dengan mendatangi lokasi panti. Percepatan vaksinasi untuk penyandang disabilitas bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

4.2.2 Ekonomi

4.2.2.1 Pariwisata

Pemda DIY menerapkan kebijakan penerapan *Pranatan Anyar Plesiran* Jogja untuk melaksanakan kegiatan kepariwisataan dengan format baru dan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Program dan kegiatan Dinas Pariwisata dalam memulihkan sektor pariwisata di DIY selama pandemi dilakukan dengan memberikan bantuan kepada pelaku pariwisata yang terdampak, sosialisasi *Pranatan Anyar Plesiran* Jogja, serta percepatan vaksinasi untuk pelaku pariwisata.

4.2.2.2 Koperasi dan UMKM

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah DIY melaksanakan sejumlah program untuk pemulihan ekonomi di sektor UMKM. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp848.615.000,00. Program Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pelatihan wirausaha dengan anggaran Rp2.874.278.400,00. Program Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah dengan anggaran Rp8.385.430.300,00. Program ini dilakukan dengan sejumlah kegiatan antara lain: membantu terjadinya kontrak kerjasama; fasilitasi sertifikasi (Halal, SNI, PIRT) untuk peningkatan branding; fasilitasi pemasaran melalui galeri di bandara YIA dan galeri SMESCO; pelatihan peningkatan kualitas produk dan kapasitas usaha UMKM; pembuatan video profil UMKM dan pemasaran produk UMKM untuk meningkatkan omset. Program Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan anggaran Rp805.955.250,00. Kegiatan dari

program ini seputar peningkatan pelaku usaha dalam menjual produknya baik secara daring maupun konvensional.

4.2.2.3 Ketenagakerjaan

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah DIY dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 pada sektor ketenagakerjaan adalah pemberdayaan tenaga kerja terdampak melalui pembentukan tenaga kerja mandiri, serta pengawasan penerapan protokol kesehatan pada perusahaan untuk memastikan perusahaan tetap dapat beroperasi selama pandemi. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY meliputi : 1)Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi; 2)Program Penempatan Kerja, dengan kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Pembekalan Kewirausahaan dan Pembekalan Tenaga Kerja Mandiri, 3) Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan, 4)Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

4.2.2.4 Pertanian

Program penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan disektor pertanian ada dua aspek yaitu dukungan produksi dan pemasaran hasil pertanian. Dukungan produksi antara lain pengelolaan lahan pekarangan, registrasi kebun dan bantuan pompa air. Dukungan pemasaran antara lain pembelian susu pasteurisasi untuk bantuan rumah sakit, pemasaran hasil pertanian melalui bazar, bantuang ongkos kirim, pembelian hasil panen untuk didistribusikan ke *shelter* Covid-19 dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Program diatas dinilai sudah tepat karena menjaga keberlangsungan produksi sekaligus menjamin penyerapan hasil panen dengan harga yang layak. Tantangan atau kendala yang muncul selama penanganan adalah proses pengajuan program penanganan Pandemi dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dirasa lebih kaku dibandingkan pengajuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

4.2.2.5 Penanaman Modal

Upaya Pemerintah Daerah DIY dalam merespon Pandemi di sektor penanaman modal adalah dengan menerapkan sejumlah kebijakan. Kebijakan jangka pendek yaitu menyiapkan pelayanan perizinan, pemantauan dan pengawasan secara daring. Kebijakan jangka Menengah memberikan prioritas kepada sektor-sektor usaha yang memiliki peran dominan dalam ekonomi daerah dan usaha yang berbasis sumber daya lokal. Berikutnya, kebijakan jangka panjang yaitu penerapan *Online Single Submission* (OSS) berbasis *Risk Base Assessment* (RBA) secara menyeluruh (pada sisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan penyiapan potensi investasi yang sifatnya *sustainable* dan *knowledge based* (*high tech*).

4.2.2.6 Perhubungan

Program/kegiatan yang dilakukan oleh dinas perhubungan DIY untuk pemulihan sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 adalah vaksinasi terhadap perusahaan angkutan darat, penyekatan dan pemantauan di titik-titik masuk/keluar wilayah DIY, perubahan jalur trans jogja mengikuti trayek yang ditutup akibat PPKM darurat, pembatasan jumlah maksimal kapasitas penumpang menjadi 50%, pembatasan jam operasional angkutan umum dan trans jogja yang semula dari jam 05.30-21.30 menjadi 05.30-18.00 WIB.

4.3. *Best Practice* (Praktik Baik)

Pandemi Covid-19 bukan kiamat. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini memaksa manusia untuk beradaptasi dan berinovasi untuk tidak sekedar bertahan namun juga bangkit dan makin mengembangkan peradaban manusia. Strategi adaptasi dan inovasi tersebut muncul dalam beragam praktik baik selama Pandemi. Misalnya, sejumlah kota tujuan wisata utama di Eropa seperti Amsterdam, Praha, dan Barcelona, menjadikan Pandemi sebagai momen untuk mengendalikan wisatawan yang berkunjung dan memperbaiki kualitas destinasi wisata maupun kota pada umumnya, dengan demikian *cultural heritage* tetap terjaga karena hanya diakses oleh wisatawan yang benar-benar menghargainya dan tidak dikunjungi oleh wisatawan yang hanya sekedar ingin berswafoto tanpa mengetahui objek yang mereka

foto. Pandemi Covid-19 ini juga telah membuat masyarakat menjadi lebih melek digital, sehingga pemasaran pariwisata secara digital akan lebih efektif. *Virtual tourism* yang banyak diluncurkan selama Pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata yang akan membuat wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata tersebut. Even-even wisata juga dapat diadakan secara hibrid.

Praktik baik semacam diatas muncul dan tersebar diberbagai sektor dan isu. Identifikasi praktik baik menjadi urgensi untuk dipahami, dipelajari dan dimodifikasi sehingga dampaknya yang mungkin semula bersifat lokal dapat ditingkatkan menjadi nasional atau bahkan global.

4.3.1 Sosial

4.3.1.1 Kesehatan

Praktik baik yang muncul selama Pandemi adalah keberhasilan Dinas Kesehatan DIY dalam membangun kolaborasi berbagi elemen (akademisi, masyarakat, mahasiswa kesehatan, BPBD) di DIY. Peran akademisi selain dalam penelitian dan pengkajian, juga memberikan kontribusi sebagai relawan dalam menambah jumlah SDM tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan DIY menggandeng beberapa perguruan tinggi kesehatan di DIY untuk membantu kekurangan tenaga kesehatan, sebanyak 300 mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi ditugaskan untuk membantu tenaga kesehatan di lapangan. Peran Jaga Warga di level masyarakat juga membantu pelaksanaan *tracing* di lapangan disamping kegiatan-kegiatan promotif. Dinas Kesehatan DIY aktif berkoordinasi dengan BPBD DIY dalam tugasannya sebagai bagian satuan tugas penanganan Covid-19 DIY. Koordinasi juga dilakukan secara rutin dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di DIY dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan) terkait *update* data kasus Covid-10 di DIY, evaluasi penerapan protokol kesehatan dan 3T (*testing, tracing, treatment*), strategi penanganan Covid-19, serta pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di DIY. Sejumlah inovasi juga dilakukan Dinas Kesehatan DIY dalam mengakselerasi penanganan Covid-19 diantaranya : *telesurvey* untuk memantau perilaku masyarakat, pembentukan

satgas oksigen, pembentukan Tim Percepatan Vaksinasi, Sentra Vaksinasi, Penguatan *Academic Health System*, dan regionalisasi laboratorium.

4.3.1.2 Kebencanaan

Praktik baik yang diperoleh di sektor kebencanaan adalah bangkitnya modal sosial komunitas Menurut Whitley & Mckenzie, (2005) modal sosial adalah istilah umum untuk menggambarkan hubungan interpersonal atau jejaring sosial yang didalamnya terdapat kepercayaan, kekuatan dan sumber daya dalam identitas geografis (desa, kota provinsi). Menurut Koh & Rebecca O, (2008) modal sosial dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menghadapi keadaan Pandemi atau bencana. Salah satu komunitas sosial yang berjejaring dan berintegrasi untuk mengoptimalkan kemanfaatannya adalah Sonjo. Sonjo (sambatan Jogja) merupakan komunitas sosial yang membantu masyarakat rentan dan beresiko terhadap penyebaran Covid-19 di DIY. Komunitas ini telah tumbuh menjadi dua puluh empat WAG (WhatsApp Grup) dengan anggota 1700 orang dengan lingkup ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Sonjo merupakan wujud komunitas sosial yang terbukti sukses menggunakan teknologi digital untuk merelokasi beragam sumber daya yang tersebar lalu dikumpulkan, dikelola dan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sonjo juga menunjukkan perannya sebagai *hub* antar komunitas sosial dalam menjalankan beragam kegiatan sosial selama Pandemi Covid-19. Menurut Regus (2020) kesadaran akan jejaring kemanusiaan dapat meluputkan dari dampak yang lebih berat dari Pandemi Covid-19.

Selanjutnya, tantangan bagi Pemerintah adalah bagaimana mengelola modal sosial tersebut sebagai aset untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal ini menjadi penting karena ancaman Pandemi Covid-19 atau bencana yang serupa masih mungkin terjadi di masa mendatang.

4.3.1.3 Ketertiban Sosial

Praktik baik yang layak untuk dikembangkan dalam ketertiban sosial adalah forum komunikasi untuk ketertiban sosial. Forum komunikasi tersebut dapat menjadi sarana efektif

untuk mengendalikan praktik pembatasan sosial dan mencegah kerumunan massa. Forum komunikasi tersebut juga teruji memberi ketenangan dimana masyarakat merasakan kehadiran Pemerintah saat mereka mengadukan pelanggaran prokes. Forum tersebut dapat dikembangkan sebagai bentuk kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial.

4.3.1.4 Pendidikan

Praktik baik yang muncul dan menonjol selama Pandemi di pendidikan adalah percepatan transformasi teknologi informasi. Peserta didik dalam waktu kurang dari dua tahun menjadi cakap dengan berbagai aplikasi teknologi informasi dan komputer (narasumber, Dikpora). Naluri peserta didik untuk belajar secara mandiri makin terbentuk dan terasah. Para guru dan pengajar juga terdorong untuk adaptif dengan mengubah metode mengajarnya berbasis teknologi informasi. Para orang tua yang dipaksa ikut terlibat menjadi lebih paham kemampuan anaknya dalam proses pembelajaran dan mengetahui potensi dan kelemahan anaknya. Menurut Dwiyo (2018) model tatap muka diperlukan pada capaian pembelajaran tertentu yang lebih efektif jika dilakukan secara tatap muka sedangkan capaian pembelajaran lain tetap dilakukan secara *online*. Model pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berbasis *blended learning* (PBBL). PBBL merupakan pembelajaran yang mengombinasikan keunggulan belajar melalui tiga sumber belajar utama, yaitu tatap muka, *offline*, dan *online* (Dwiyo, 2018). Pengembangan pembelajaran berbasis *blended learning* membantu mahasiswa dan siswa lebih maksimal dalam proses pembelajaran dalam membantu memudahkan tugas pendidik (Dwiyo, 2018). Alternatif metode pembelajaran serupa dengan model pembelajaran diungkapkan oleh Jayul & Irwanto (2020) dimana metode daring sebagai alternatif, namun untuk memfasilitasi metode pembelajaran praktik menggunakan metode dengan aplikasi video. Prinsip pembelajaran berdasarkan tiga aspek penilaian dalam pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.

Berkenaan dengan kebutuhan pembelajaran tersebut, sebelum pandemi Covid-19 pada tahun 2020 di DIY, Pemerintah Daerah DIY telah memiliki inovasi pembelajaran jarak jauh

(narasumber, Dikpora). Program JogjaBelajar Class atau JB Class sebuah *platform* Pendidikan online yang dikelola oleh Dikpora DIY melalui UPT Balai Teknologi Komunikasi. Inovasi tersebut telah diapresiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN RB yang menobatkan inovasi *Melintasi Batas Ruang Kelas Bersama Jogjabelajar Class* sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020.¹⁰ Inovasi ini didukung penuh oleh Gubernur DIY yang mempresentasikan di depan panelis Kemenpan RB sebagai berikut,

Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowono menjelaskan bahwa Jogjabelajar Class merupakan salah satu layanan di portal Jogjabelajar (JB) yang berfungsi layaknya kelas maya sebagai ruang pembelajaran untuk membantu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta. JB merupakan layanan pembelajaran daring yang bisa diakses melalui <https://jogjabelajar.org> atau <https://jogjabelajar.jogjaprov.go.id> yang memuat berbagai konten, seperti JB Media, JB Budaya, JB Tube, JB Radio, serta JB Class.

Awalnya, JB Class hanya dirancang sebagai suplemen untuk melengkapi pembelajaran konvensional untuk memfasilitasi tatap muka antara guru dan siswa yang bisa dipantau secara langsung oleh orang tua. Adanya JB Class ini juga merupakan adaptasi dari gaya belajar bagi generasi milenial ke bawah yang serba digital yang dikembangkan agar para guru dan siswa bisa berkomunikasi di luar jam pembelajaran formal yang dirancang sesuai dengan kebutuhan. Di tahun 2020 ini, keberadaan JB Class menjadi andalan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Layanan kelas maya melalui Jogjabelajar Class menjadi penting semenjak pandemi Covid-19 merebak yang tidak memungkinkan pembelajaran berlangsung secara normal.¹¹

Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY mendukung inovasi ini terutama karena kebutuhan layanan kelas maya menjadi penting selama pandemi dengan penghentian aktivitas pendidikan konvensional di sekolah serta menggantikannya dengan aktivitas belajar di rumah.¹² Selama masa pandemic di

¹⁰ Lebih lanjut dapat dibaca Menpan RB. (2020). *Top 45 dan 5 Pemenang Outstanding Achievement Inovasi Pelayanan Publik 2020 Telah Ditetapkan*. Pada url <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/top-45-dan-5-pemenang-outstanding-achievement-inovasi-pelayanan-publik-2020-telah-ditetapkan>, diakses 1 November 2021.

¹¹ Lebih lanjut dapat dilihat pada Menpan RB. (2020). *Geliat Inovasi dari Yogyakarta Warnai Presentasi dan Wawancara KIPP Hari Keenam*, pada url <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/geliat-inovasi-dari-yogyakarta-warnai-presentasi-dan-wawancara-kipp-hari-keenam> diakses 1 November 2021.

¹² Lihat lebih lanjut pada Menpan RB. (2020). *Jogja Belajar Class Solusi Pembelajaran Daring*. Pada url <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class->

DIY, Jogja Belajar Class dapat menjadi alternatif dari platform pembelajaran digital bagi sekolah dan siswa di DIY yang tersedia secara gratis selain Google Classroom, Ruang Guru, Quipper, dan Rumah Belajar. Gubernur DIY mempersilakan daerah lain untuk mereplikasi, memodifikasi dan mengimplementasikan sesuai konteks daerah masing-masing¹³ sebagai sumbangsih DIY untuk Indonesia dalam inspirasi/ inovasi pemerataan akses pendidikan modern. Sejumlah dinas pendidikan dari provinsi lain telah berkunjung ke Balai Tekkomdik DIY untuk studi banding layanan daring Jogja Belajar Class antara lain Dinas Pendidikan dan DPRD Provinsi Bali, Balai Tekkom Provinsi Jambi, Balai Tekkom Provinsi Maluku, Balai Tekkom Provinsi Gorontalo, Balai Tekkom Provinsi NAD, serta beberapa pemerintah kota dan kabupaten.¹⁴

4.3.1.5 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berkenaan dengan peningkatan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, praktik baik yang dijalankan oleh DP3AP2 adalah dengan mengoptimalkan peran,

1. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Rekso Dyah Utami P2TPAKK RDU) DIY pada sub kegiatan Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam melayani kasus (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021)
2. optimalisasi satgas perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dengan bekerja kolaboratif bersama pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat desa, serta stakeholder non pemerintah seperti kader-kader dan PKK (narasumber).
3. membentuk jejaring kerja Perlindungan Perempuan dan Anak (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021)
4. mengoptimalkan Forum Data Gender dan Anak (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021)

[solusi-pembelajaran-daring](#) diakses 1 November 2021.

¹³ Lihat lebih lanjut pada Menpan RB. (2020). *Jogja Belajar Class Solusi Pembelajaran Daring*. Pada url <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class-solusi-pembelajaran-daring> diakses 1 November 2021.

¹⁴ Lihat lebih lanjut pada Menpan RB. (2020). *Jogja Belajar Class Solusi Pembelajaran Daring*. Pada url <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class-solusi-pembelajaran-daring> diakses 1 November 2021.

5. Optimalisasi sistem data pelaporan (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021)

Adapun dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian perempuan, DP3AP2 memberikan paket hibah untuk (1) hibah Penguatan kelembagaan Desa PRIMA yang diberikan pada kelompok Desa PRIMA "*Sejahtera Abadi*" (Desa Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo) dan (2) Desa PRIMA "Gumregah" (Desa Putat, Kec. Patuk, Kab. Gunungkidul) pada sub kegiatan Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan serta (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021).

Pengembangan usaha Desa PRIMA, dengan pemberian hibah dan pendampingan diharapkan dapat memberikan posisi tawar perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk pada gizi, membuka pasar melalui komunitas Kelompok Ekonomi Produktif Prima dengan menjadi mitra pemasaran dan pemasok bahan baku (Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021). Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok perempuan dalam Desa Prima juga menjadi pintu masuk bagi proses pengorganisasian dan pemberdayaan perempuan dalam upaya kesetaraan gender yang pada gilirannya akan mendorong perempuan makin berperan dalam proses pengambilan keputusan, terakomodasinya kebutuhan perempuan dan anak yang diharapkan dapat berujung pada meningkatnya perekonomian perempuan dan mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan ((Raport Kinerja DP3AP2, s/d TW III, 2021).

4.3.1.6 Kebudayaan

Dinas Kebudayaan (narasumber) menyampaikan praktik baik yang telah dilaksanakan dalam penanganan Covid-19 sesuai bidangnya antara lain,

- a. Mengoptimalkan vaksinasi untuk 10.000 pelaku seni budaya melanjutkan momentum vaksinasi 500 seniman pada Maret 2021 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Media Indonesia, 10 Maret 2021) dalam rangka mewujudkan

herd immunity dan sebagai *game changer* sosial ekonomi (Laporan Ekonomi BI DIY, Mei 2021).

- b. Pentas Seni Daring dengan memanfaatkan platform digital yang sudah tersedia seperti Youtube. Salah satu yang fenomenal adalah viralnya Flm Tilik yang diproduksi oleh Dinas Kebudayaan pada tahun 2018 bersama komunitas/pelaku film DIY, Ravacana Pictures. Fenomena film Tilik mendorong Dinas Kebudayaan untuk melihat peluang pendapatan daerah dan pendapatan seniman melalui media sosial salah satunya YouTube. Secara lebih luas, menurut Dinas Kebudayaan (narasumber) masih diperlukan adaptasi alih teknologi oleh pelaku seni budaya selain pelaku film yang relatif melek teknologi.
- c. Kolaborasi Dinas Kebudayaan dengan pelaku seni lokal yang populer seperti Ndarboy Gank untuk mendorong pelaku seni dan budaya aktif dan menghasilkan pendapatan melalui media sosial/ platform digital atau optimalisasi konten.
- d. Inklusivitas keuangan sesuai protokol kesehatan dengan memberikan bantuan seniman dengan menggunakan teknologi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

4.3.1.7 Pelayanan Sosial

Praktik baik yang muncul adalah kerja kolaboratif Dinas Sosial DIY bersama mitra terkait dalam percepatan program/ kegiatan penanggulangan dampak sosial Covid-19. Dinas Sosial DIY bekerjasama dengan Dinas Kominfo DIY melakukan *cleansing* dan *crossing data* untuk menghindari sasaran penerima mendapatkan bansos lebih dari satu program. Kerjasama juga dilakukan antara Dinas Sosial DIY dengan Dinas Dukcapil di Kabupaten/Kota dan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY terkait pendataan klien panti dan kelompok marginal yang belum memiliki identitas kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar warga tersebut bisa masuk dalam DTKS dan berhak mendapatkan bansos. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melakukan upaya “jemput bola” sekaligus melakukan perekaman data.

Dinas Sosial DIY juga memfasilitasi peran partisipasi masyarakat melalui saluran layanan pengaduan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 563 pengaduan dan pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui web resmi Dinas Sosial DIY. Pengaduan dan pertanyaan yang diajukan mayoritas terkait pelaksanaan bansos seperti bagaimana mekanisme penyaluran bansos dan pengaduan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bansos. Pengaduan dan pertanyaan tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketugasan dan kewenangan.

4.3.2 Ekonomi

4.3.2.1 Pariwisata

Praktik baik yang dilakukan oleh sejumlah pelaku industri wisata adalah peningkatan nilai produk melalui *quality tourism*. Pariwisata DIY dibuat lebih mengutamakan *quality tourism* daripada *mass tourism*. Beberapa aspek dari *quality tourism* yaitu: *high quality market segment*, *high quality products* dan mengarah pada *sustainability*. Usaha peningkatan *quality tourism* terlihat dari sejumlah usaha antara lain destinasi wisata disiapkan lebih inklusif; kawasan wisata dibangun terpadu, adopsi dan penerapan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety* dan *Environment Sustainability*); program paket wisata dan kuliner untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan; peningkatan kualitas pemandu wisata dengan nilai lokal; peningkatan kompetensi seniman lokal; modernisasi pengolahan kuliner tradisional agar awet sebagai oleh-oleh dan rekayasa sosial masyarakat agar nilai-nilai budaya Jawa dapat berinteraksi dalam aktivitas wisatawan.

4.3.2.2 Koperasi dan UMKM

Praktik baik yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY selama Pandemi Covid-19 adalah aplikasi SiBakul dan kebijakan bantuan ongkos kirim baik dalam negeri dan luar negeri. SiBakul merupakan akronim dari sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha. SiBakul Jogja merupakan pusat data koperasi dan UKM DIY dimana kegiatan pembinaan koperasi dan UKM di wilayah DIY yang wajib terintegrasi dengan adanya data SiBakul Jogja, untuk menjaga keterbaruan,

soliditas, akurasi dan integrasi. SiBakul Jogja adalah sistem kegiatan pembinaan UKM dan koperasi untuk memandu dalam menentukan langkah modernisasi dan mengembangkan usahannya, sehingga para pelaku UKM menjadi roda ekonomi yang *modern* dan efektif (Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2021). SiBakul saat ini telah memayungi 302.801 UKM dan 1.818 koperasi. SiBakul dan kebijakan gratis ongkirnya terbukti mampu membangun kemitraan dengan lintas platform online (gojek, grab, jogja kita) dengan ekspedisi (PT Pos, JNE) dalam mendukung keberlanjutan usaha Koperasi dan UMKM. Dimasa mendatang SiBakul diharapkan berkembang dari market hub menjadi *market place* sehingga membantu percepatan transformasi Koperasi dan UMKM menuju perdagangan yang berdaya saing tinggi di era teknologi informasi.

Dari sisi pelaku usaha koperasi dan UMKM praktik baik yang muncul adalah adaptasi pelaku usaha dalam menyikapi Pandemi Covid-19. Pelaku usaha menyesuaikan produknya untuk kebutuhan selama Pandemi Covid-19 semisal produk paket isoman, *hamper* untuk isoman dan layanan antar untuk pasien Covid-19 yang sedang isoman. Pelaku usaha cinderamata dan oleh-oleh di sektor pariwisata melakukan strategi jemput bola dengan menawarkan produknya secara daring sehingga tidak menunggu perubahan kebijakan PPKM.

4.3.2.3 Ketenagakerjaan

Praktik baik yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY adalah tetap menyediakan layanan dan akses terhadap informasi lowongan pekerjaan di DIY yang dapat menjembatani pencari kerja dengan pemberi kerja, serta melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan wirausaha mandiri melalui Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) DIY secara gratis kepada masyarakat. Beberapa contoh pelatihan yang diberikan antara lain : *english for tourism*, tata rias pengantin, desainer pakaian dan hotel staff.

4.3.2.4 Pertanian

Praktik baik atau *best practise* yang diperoleh selama Pandemi ini adalah kecepatan adaptasi dan prioritas program pertanian

yang mendukung proses produksi dan jaminan penyerapan hasil panen di pasar. Praktik baik tersebut akan lebih lancar apabila didukung dengan pembenahan proses administrasi yang *luwes* dan responsif. Peluang praktik baik yang dapat dilakukan adalah sinergi sektor pertanian dengan sektor ketenagakerjaan. Selama Pandemi diketahui terjadi peningkatan pengangguran baik disisi lain sektor pertanian menyediakan peluang program padat karya semisal perbaikan saluran irigasi, penyiapan lahan produksi hingga distribusi hasil panen. Kerjasama dua sektor tersebut dapat menjadi praktik baik untuk kesiapsiagaan bencana.

4.3.2.5 Penanaman Modal

Praktik baik yang dilakuka oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY adalah pelayananan perizinan secara *omnichanel* untuk menjamin keberlangsungan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara daring, serta melaksanakan secara kontinyu Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan secara daring.

4.3.2.6 Perhubungan

Praktik baik yang muncul di sektor perhubungan adalah koordinasi yang baik dengan kepolisian sehingga kebijakan pembatasan dan penyekatan jalan dapat menurunkan volume kendaraan yang masuk ke wilayah DIY selama Pandemi. Tersedianya kebijakan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di perbatasan dan terminal sehingga mendukung pengendalian protokol kesehatan. Selain itu kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk mengecek kesehatan pengendara layak mendapat apresiasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan tatanan sosial dan ekonomi di DIY serta menuntut sikap aktif dan responsif baik secara individual, masyarakat dan organisasi.
2. Program pemulihan Covid-19 oleh Pemda DIY diduga dapat mendorong pemulihan Pandemi Covid-19 dengan bukti melandainya angka konfirmasi positif Covid-19 dan kembali aktifnya tata kehidupan sosial ekonomi baik secara daring dan perlahan untuk luring
3. Terdapat sejumlah praktik baik pemulihan Covid-19 baik yang diinisiasi pemerintah maupun komunitas sosial, dan perlu dikolaborasikan lebih baik ke depan -dalam kerangka *governance*.

5.2 Saran

1. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk mengadopsi perilaku adaptasi menghadapi Pandemi Covid-19 sebagai bagian dari strategi kesiapsiagaan bencana
2. Pemda DIY perlu untuk menyusun program pemulihan Covid-19 sebagai respon programatik bukan hanya respon terhadap krisis bencana. Seperti yang disarankan beberapa ahli dengan strategi simultan keju swiss dalam menghadapi pandemic sampai menjadi endemic.
3. Pemda DIY perlu untuk mengidentifikasi modal sosial sebagai mitra kerja dalam kesiapsiagaan bencana

4. Perlu adanya penelitian lanjut untuk faktor-faktor yang mempengaruhi suatu praktik baik dapat diterapkan sebelum dilakukan perluasan atau duplikasi.
5. Perlu adanya strategi berkelanjutan agar kepatuhan protokol kesehatan menjadi bagian dari gaya hidup untuk kesiapsiagaan bencana pandemi medis, misalnya bersinergi dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Jayul, Edi Irwanto, 2020, Model Pembelajaran Daring Sebagai Alternatif Proses Kegiatan Belajar Pendidikan Jasmani di Tengah Pandemi Covid-19, Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi
- Agung, I. M. (2020). *Memahami Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Makalah. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol. 1, No. 2, Mei, 2020 (68 – 84) e-ISSN : 2720 – 8958 DOI : 10.24014/pib.vii2.9616 68
- Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19, 6(2), 233–247.
- Baird S., dkk, (2020) *Direct and indirect impacts of Covid-19 on health and wellbeing : Rapid Evidence Review*, England, Public Health Institute at Liverpool John Moores University
- Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta. *Laporan Perekonomian Di Yogyakarta Mei 2021*. Yogyakarta: Bank Indonesia
- BPS, (2020), Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan Indonesia September 2020 No. 16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021
- BPS DIY. (2021). *Perilaku Masyarakat Pada Masa PPKM Darurat D.I. Yogyakarta : Hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 Periode 13-20 Juli 2021*, Yogyakarta: BPS DIY.
- Budastra IK, (2020), Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 dan Program Potensial untuk Penanganannya : Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Agrimansion : Vol 21 No 1 (2020)*, April 2020, pp 48-57

- Detik.com 11 Mei 2021. *Pemda DIY Akan Pakai Danais untuk Atasi Pandemi Covid-19*. Selengkapnya pada <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5010924/pemda-diy-akan-pakai-danais-untuk-atasi-Pandemi-Covid-19>. Diakses 1 September 2021.
- Dinas Kesehatan DIY. (2020). *Respon Masyarakat Terhadap Covid-19 di DIY (Kajian periode 1)*. Yogyakarta: Dinas Kesehatan DIY
- Dinas Koperasi UMKM DIY. (2020). *Kajian Kebijakan Pemulihan Ekonomi Daerah Terdampak Covid-19*. Yogyakarta: Dinas Koperasi dan UKM, DIY.
- El-Erian M, (2020), *The Coming Coronavirus Recession and the Uncharted Territory Beyond*, <https://www.foreignaffairs.com>, diakses tanggal 7 November 2021
- Gloria Setyvani Putri, (2020), *Menelusuri Klaster Pertama Penularan Covid-19 di Indonesia*, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/10/23/090200623/menelusuri-klaster-pertama-penularan-Covid-19-di-indonesia?page=all>, diakses tanggal 19 Februari 2021
- IGPA & Forbil Institute. (2020). *Tidak Kerja, Tidak Makan: Kondisi Pekerja Rentan di Tengah Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: MAP UGM.
- Kaligis, F. dkk (2020). *Stress during Covid-19 Pandemi: mental health condition in Indonesia*. Medical Journal of Indonesia. ISSN: 0853-1773, eISSN: 2252-8083 <https://doi.org/10.13181/mji.bc.204640> Med J Indones. 2020;29:436–41
- Kantor Wilayah DJPb DIY. (2020). *Kajian Efektivitas Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kanwil DJPb DIY
- Kissler S, dkk, (2020) *Social distancing strategies for curbing the Covid-19 epidemic*, Harvard University's DASH Repository

- Koh, H. K., & Rebecca O, C. (2008). Disaster Preparedness and Social Capital. In K. I, S. S, & D. Kim (Eds.), *Social Capital and Health* (pp. 273–285). New York: Springer, New York, NY. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-0-387-71311-3_13
- Kumar, K. (1987). *Conducting Focus Group Interviews In Developing Countries A.I.D. Program Design and Evaluation Methodology Report*. Washington DC.
- Laporan Penggunaan APBD Untuk Penanganan Covid-19, s/d 23 Agustus 2021. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- LKPJ Gubernur DIY Tahun 2020. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Livana PH., dkk (2020), Gambaran Kecemasan Masyarakat Dalam Berkunjung Ke Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa Volume 2 No 3*, pp. 121-128
- Mawaddah Nurul dkk, (2020), Tatanan Hidup Baru Pelayanan Kesehatan Posyandu Lansia Pada Era Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbertebu Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Abdimakes*, Vol. 1 No.1 Januari 2020, pp. 6-13
- Media Indonesia, 10 Maret 2021 pada *Presiden Jokowi Tinjau Vaksin Covid-19 untuk Seniman*
- Merdeka.com, 1.734 Anak di Yogyakarta Kehilangan Orang Tua di Masa Pandemi Covid-19 <https://www.merdeka.com/peristiwa/1734-anak-di-yogyakarta-kehilangan-orang-tua-di-masa-pandemi-covid-19.html> diakses tanggal 10 November 2021
- Menpan RB. (2020). *Geliat Inovasi dari Yogyakarta Warnai Presentasi dan Wawancara KIPP Hari Keenam*, pada url <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/geliat-inovasi-dari-yogyakarta-warnai-presentasi-dan-wawancara-kipp-hari-keenam> diakses 1 November 2021.

- Menpan RB. (2020). *Top 45 dan 5 Pemenang Outstanding Achievement Inovasi Pelayanan Publik 2020 Telah Ditetapkan*. Pada url <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/top-45-dan-5-pemenang-outstanding-achievement-inovasi-pelayanan-publik-2020-telah-ditetapkan>, diakses 1 November 2021.
- Menpan RB. (2020). *Jogja Belajar Class Solusi Pembelajaran Daring*. Pada url <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/jogja-belajar-class-solusi-pembelajaran-daring> diakses 1 November 2021.
- Nainggolan, S., dkk. (2021). *Kajian Kesiapan Pelayanan Kesehatan Selama Pandemi Covid -19 dan Kesiapsiagaan Memasuki Masa Pemulihan di DIY*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah DIY.
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Nurrahman, A. (2020). Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta), 2(1), 1–16.
- OECD, (2020), *Beyond Containment: Health system responses to Covid-19 in the OECD*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.07/2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virusdisease2019 (Covid-19) dan Dampaknya

- Peta Sebaran Covid-19 Nasional, www.Covid-19.go.id, Diakses tanggal 19 Februari 2021
- Raport Kinerja Dinas Kebudayaan s/d TW I, 2021. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Raport Kinerja Dinas Kebudayaan s/d TW II 2021. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Raport Kinerja Dinas Kebudayaan s/d TW III, 2021. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Raport Kinerja Dinas Kebudayaan s/d TW III, 2021. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Raport Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga s/d TW IV, 2020. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Raport Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga s/d TW III, 2021. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Raport Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk s/d TW IV, 2020. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Raport Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk s/d TW III, 2021. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Raport Kinerja Paniradya Kaistimewan s/d TW IV, 2020. (2021). Yogyakarta: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2021).Rancangan Akhir RKPD 2022 Kota Yogyakarta

- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2021) Rancangan Akhir RKPD 2022 Kabupaten Bantul
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2021) Rancangan Akhir RKPD 2022 Kabupaten Gunungkidul
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2021) Rancangan Akhir RKPD 2022 Kabupaten Kulon Progo
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021) Rancangan Akhir RKPD 2022 Kabupaten Sleman
- Regus, M. (2020). PENTINGNYA REVITALISASI MODAL SOSIAL PASKA PANDEMI Covid-19 (THE IMPORTANCE OF REVITALIZING SOCIAL CAPITAL IN THE POST-COVID-19 PANDEMI), 2902, 11–14.
- Ritchey KJ, dkk (2021), Covid-19: Qualitative Research With Vulnerable Populations, *Nursing Science Quarterly* 2021, Vol. 34(1), pp. 13-19
- Sachs J, dkk, (2020), *Sustainable Development Report 2020 : The Sustainable Development Goals and Covid-19*, Cambridge University Press
- Situasi global Covid-19, <https://Covid-19.who.int>, diakses tanggal 19 Februari 2021
- Soetjipto, Noer. 2020. *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: K-Media.
- Sugiarti, Y., Sari, Y., & Hadiyat, M. A. (2020). Peranan E-Commerce untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sambal di Jawa Timur. *Jurnal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 298–309. <https://doi.org/https://doi.org/10/24198/kumawula.v3i2.28181>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. (S. Y. Suryandari, Ed.) (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi A, dkk, (2020), Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 56, No. 2, 2020: 175–19

- Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 32/ KEP/ 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/ KEP/ 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UNICEF, (2012), *Ringkasan Kajian Gizi Ibu dan Anak*, UNICEF : Unite for Children;Peta Sebaran Kasus Covid-19, <https://www.Covid-19.go.id>, diakses tanggal 3 November 2021
- UNICEF, UNDP, Prospera, & SMERU (2021), *Analysis of the Social and Economic Impacts of COVID-19 on Households and Strategic Policy Recommendations for Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Wasis D. Dwiyogo, 2018, Pembelajaran Berbasis Blended Learning , Rajawali Jakarta,
- Whitley, R., & Mckenzie, K. (2005). *Social capital and psychiatry: review of the literature* (Mar-April). Harv Rev Psychiatry. <https://doi.org/10.1080/10673220590956474>
- WHO, <https://Covid-19.who.int/>
- WHO. (2020) *Long-stay mental health care institutions and the Covid-19 crisis: identifying and addressing the challenges for better response and preparedness*. Kopenhagen: WHO Europe.
- Wibowo Agung, (2021), *Statistik Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2021*, BPS Provinsi DIY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kegiatan Yang Tidak Tuntas Diselesaikan Dinas Kebudayaan

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
1	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	100	97	Secara umum kegiatan telah berjalan, namun adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa menyebabkan pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan. Hal tersebut berdampak pada capaian fisik maupun keuangan.
2	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya	100	98	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa menyebabkan pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan. Hal tersebut berdampak pada capaian fisik maupun keuangan.

Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
3	Penghargaan Seniman dan Budayawan	100	99	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa menyebabkan pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan. Hal tersebut berdampak pada capaian fisik maupun keuangan.
4	Gelar Budaya Jogja	100	97	Pada kegiatan Yogya Gamelan Festival, Dinas Kebudayaan DIY bekerjasama dengan Komunitas Gayam untuk pelaksanaannya. Namun sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut Pihak Komunitas Gayam tidak menginformasikan bahwa kegiatan tersebut juga didukung pembiayaan oleh Kemendikbud RI. Agar tidak terjadi duplikasi anggaran, maka dukungan dari Dinas Kebudayaan DIY tidak jadi direalisasikan.

Daftar Lampiran

5	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	100	98	<p>Pelaksanaan Sonja Budaya dengan konsep kegiatan berupa sosialisasi budaya melalui media elektronik yang melibatkan peran beberapa pelaku budaya urung direalisasikan, penyebabnya adalah pelaku utama yang akan berperan dalam kegiatan dimaksud terpapar Covid-19 sehingga harus melakukan proses isolasi selama 14 hari.</p> <p>Pelaksanaan Dialog Budaya dengan peserta pelaku budaya dan Narasumber Gubernur DIY untuk edisi terakhir Tahun 2020 tidak bisa i dilaksanakan mengingat situasi akhir tahun pelaksanaan kegiatan secara tatap muka mempunyai resiko yang cukup besar di era Pandemi Covid-19.</p>
---	----------------------------------	-----	----	---

Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY

6	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	100	58	<p>Fasilitasi penyelenggaraan <i>event</i> untuk komunitas maupun organisasi budaya (berdasarkan proposal yang disampaikan ke Dinas Kebudayaan DIY), sebagian besar masih dalam konsep pertunjukan dalam situasi normal.</p> <p>Sedangkan anggaran yang dialokasikan di kegiatan telah menggunakan konsep Pertunjukan Daring.</p> <p>Hal tersebut menyebabkan beberapa komunitas tidak jadi melaksanakan kegiatan karena tidak sesuai dengan konsep awal yang diajukan.</p>
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	100	89,44	<p>Beberapa belanja disesuaikan dengan kebutuhan kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19, terdapat pemutusan langganan internet karena sudah ada jaringan Pemda DIY di Museum Pleret, dan adanya subsidi tagihan listrik.</p>

Daftar Lampiran

2	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	100	47,39	Rasionalisasi Covid-19
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100	67,42	Rasionalisasi Covid-19
4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	100	88,98	Rasionalisasi Covid-19
5	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	79,20	Rasionalisasi Covid-19
6	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	100	86,93	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.
7	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	100	87,08	Adanya adendum pada Belanja Makan Minum WKM.
8	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	100	85,53	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	100	84,60	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.

Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY

10	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	100	81,66	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan
11	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	100	89,82	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan
12	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	100	65,35	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan
13	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	100	71,69	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan
14	Penghargaan Seniman dan Budayawan	100	83,39	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan

Daftar Lampiran

15	F e s t i v a l K e b u d a y a a n Yogyakarta	100	65,45	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan <u>Protokol Kesehatan</u>
16	Gelar Budaya Jogja	100	55,13	Pada kegiatan Yogya Gamelan Festival, Dinas Kebudayaan DIY bekerjasama dengan Komunitas Gayam untuk pelaksanaannya. Namun sampai dengan menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut Pihak Komunitas Gayam tidak menginformasikan bahwa kegiatan tersebut juga didukung pembiayaan oleh Kemendikbud RI. Agar tidak terjadi duplikasi anggaran, maka dukungan dari Dinas Kebudayaan DIY tidak jadi <u>direalisasikan</u> .
17	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	100	87,74	Pelaksanaan Sonja Budaya dengan konsep kegiatan berupa sosialisasi budaya melalui media elektronik yang melibatkan peran beberapa pelaku budaya urung direalisasikan, penyebabnya adalah pelaku utama yang akan berperan dalam kegiatan dimaksud terpapar Covid-19 sehingga harus melakukan proses isolasi selama 14 hari.

				Pengambilan gambar direncanakan dilaksanakan pada bulan Desember 2020, Rincian obyek belanja tidak memungkinkan untuk merubah konsep dimaksud.
18	Selendang Sutera	100	75,46	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan
19	P e m b i n a a n P e n g h a y a t Kepercayaan, Adat dan Tradisi	100	75,81	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan
20	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur Dalam Masyarakat	100	85,17	Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan

Daftar Lampiran

21	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	100	58,76	<p>Fasilitasi penyelenggaraan event untuk komunitas maupun organisasi budaya (berdasarkan proposal yang disampaikan ke Dinas Kebudayaan DIY), sebagian besar masih dalam konsep pertunjukan dalam situasi normal.</p> <p>Sedangkan anggaran yang dialokasikan di kegiatan telah menggunakan konsep Pertunjukan Daring.</p> <p>Hal tersebut menyebabkan beberapa komunitas tidak jadi melaksanakan kegiatan karena tidak sesuai dengan konsep awal yang diajukan</p>
22	P e m b i n a a n Kelembagaan Adat dan Tradisi	100	78,70	<p>Adanya Pandemi Covid-19 dan himbauan pemerintah tentang larangan kegiatan pengumpulan masa maka pelaksanaan kegiatan ditunda dan didesain ulang dengan memperhatikan Protokol Kesehatan</p>

Lampiran 2. Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan Pemulihan Pelaku Seni Budaya 2021

no	Program	Sub Kegiatan	Realisasi (Rp)	Output/ Sub Output	Target Sasaran	Triwulan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Adat, Tradisi Seni, dan Lembaga Budaya (Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat)	1.500.000	Pembelian obat-obatan dan vitamin untuk pelaku seni Pentas Wayang	24 Grup	I
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Memanggungkan Kemitraan dengan lembaga Pelestari Budaya (Launching Yogyakarta Royal Orchestra)	6.000.000	Penyelenggaraan GNose untuk semua pelaku budaya dan Crew serta Tim yang terlibat dalam kegiatan <i>Launching</i> Yogyakarta Royal Orchestra tanggal 21 Juni 2021 di Pagelaran Kraton Yogyakarta (200 orang)	200 orang	Triwulan II

no	Program	Sub Kegiatan	Realisasi (Rp)	Output/ Sub Output	Target Sasaran	Triwulan
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya (Terima Kasih Jogja bermitra dengan Aliansi Mahasiswa Nusantara)	8.500.000	Penyelenggaraan <i>swab antigen</i> untuk semua pelaku seni yang terlibat dan tamu VIP pada kegiatan Terima Kasih Jogja di Tebing Breksi 31 Mei 2021 (50 orang)	50 orang	Triwulan II
4	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	660.601.500	Vaksinasi : 10000 Pelaku seni dan Budaya	1000 pelaku (terrealisasi dosis 1); dari total pagu Rp1.321.203.000	Triwulan III
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Publikasi Seni Budaya Daerah *) Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya QRIS	200.000.000	Pemberdayaan Pelaku Seni Budaya melalui pentas menggunakan aplikasi QRIS : 1 Even (50 Seniman) dari 1 Even (50 Seniman)	50 seniman	Triwulan III
		Total Realisasi	876.601.500			

Lampiran 3. Tabulasi Kuisisioner

No	OPD/non OPD	Kelompok	Pertanyaan	respon
1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	Ekonomi	<p>1. Bagaimana skala dampak Pandemi Covid-19 terhadap sektor usaha di DIY khususnya UMKM?</p> <p>a. Berat b. Sedang c. Ringan</p> <p>2. Deskripsikan dampak apa saja yang dialami oleh UMKM selama Pandemi.</p> <p>3. Apa kebijakan Pemda DIY dalam membantu sektor UMKM yang terkena dampak Pandemi Covid-19?</p> <p>4. Apa program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM dalam membantu sektor UMKM?</p> <p>5. Apa peran koperasi dalam membantu masyarakat menghadapi Pandemi Covid-19?</p> <p>6. Apakah ada informasi atau data tambahan terkait sektor UMKM di DIY selama Pandemi Covid-19?</p>	
2	Dinas Pariwisata DIY	Ekonomi	<p>1. Bagaimana skala dampak Pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata di DIY?</p> <p>a. Berat b. Sedang c. Ringan</p> <p>2. Deskripsikan dampak apa saja yang dialami sektor pariwisata selama Pandemi.</p> <p>3. Apa kebijakan Pemda DIY dalam memulihkan sektor pariwisata di DIY selama Pandemi?</p> <p>4. Apa program dan kegiatan Dinas Pariwisata dalam memulihkan sektor pariwisata di DIY selama Pandemi?</p> <p>5. Apakah ada informasi atau data tambahan terkait sektor pariwisata di DIY selama Pandemi Covid-19?</p>	

Daftar Lampiran

3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Ekonomi	<p>1. Bagaimana skala dampak Pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di DIY?</p> <p>a. Berat b. Sedang c. Ringan</p> <p>2. Deskripsikan dampak apa saja yang dialami tenaga kerja DIY selama Pandemi Covid-19.</p> <p>3. Apa kebijakan Pemda DIY dalam membantu tenaga kerja yang terkena dampak Pandemi?</p> <p>4. Apa program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di DIY?</p> <p>5. Apa pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap kegiatan transmigrasi di DIY?</p> <p>6. Apakah ada informasi atau data tambahan terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi di DIY selama Pandemi Covid-19?</p>	
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Ekonomi	<p>1. Bagaimana skala dampak Pandemi Covid-19 terhadap perindustrian dan perdagangan di DIY?</p> <p>a. Berat b. Sedang c. Ringan</p> <p>2. Deskripsikan dampak apa saja yang terjadi pada perdagangan dan perindustrian di DIY akibat Pandemi Covid-19.</p> <p>3. Apa kebijakan Pemda DIY untuk memulihkan perindustrian dan perdagangan di DIY akibat Pandemi Covid-19?</p> <p>4. Apa program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di DIY?</p> <p>5. Apakah ada informasi atau data tambahan terkait perindustrian dan perdagangan di DIY selama Pandemi Covid-19?</p>	

Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY

5	Satuan Polisi Pamong Praja	Ekonomi	<p>1. Bagaimana penerapan protokol kesehatan pada masyarakat DIY secara umum?</p> <p>a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik</p> <p>2. Apa aturan yang diterapkan Pemda DIY dalam pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengurangi penularan Covid-19?</p> <p>3. Apa program dan kegiatan SatPol PP DIY yang dilakukan selama Pandemi Covid-19?</p> <p>4. Apakah ada informasi atau data tambahan terkait penerapan keamanan dan ketertiban di DIY selama Pandemi Covid-19?</p>	
6	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Ekonomi	<p>1. Apa dampak Pandemi Covid-19 pada perekonomian di DIY?</p> <p>2. Apa saja kebijakan ekonomi makro dan mikro untuk memulihkan kondisi perekonomian DIY akibat Pandemi Covid-19?</p>	
7	ASITA DIY	Ekonomi	<p>1. Bagaimana skala dampak Pandemi Covid-19 terhadap perjalanan wisata di DIY?</p> <p>a. Berat b. Sedang c. Ringan</p> <p>2. Deskripsikan dampak apa saja yang terjadi akibat Pandemi Covid-19.</p> <p>3. Apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait pariwisata selama ini sudah cukup baik?</p> <p>4. Apa yang perlu dilakukan pemerintah/sektor swasta untuk membantu memulihkan pariwisata di DIY?</p>	
8	PHRI	Ekonomi	<p>1. Bagaimana skala dampak Pandemi Covid-19 terhadap usaha perhotelan di DIY?</p> <p>a. Berat b. Sedang c. Ringan</p> <p>2. Deskripsikan dampak apa saja yang terjadi akibat Pandemi Covid-19.</p> <p>3. Apakah kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait pariwisata selama ini sudah cukup baik?</p> <p>4. Apa yang perlu dilakukan pemerintah/sektor swasta untuk membantu memulihkan pariwisata di DIY?</p>	

Daftar Lampiran

9	Dinas Kesehatan DIY	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deskripsikan dampak Pandemi Covid-19 terhadap sektor kesehatan di DIY terutama pemberian layanan kesehatan. 2. Apa saja kebijakan yang diterapkan pada sektor kesehatan di DIY selama Pandemi Covid-19? 3. Apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan kebijakan pada sektor kesehatan? 4. Apa inovasi yang dilakukan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 pada sektor kesehatan? 5. Sejauh mana kolaborasi dengan stakeholder terkait dan dalam hal apa? 6. Apa kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memperkuat layanan kesehatan (SDM, sarpras, regulasi)? 7. Apakah dalam melakukan intervensi dan layanan dirasa sudah optimal? Sejauh mana kepuasan penyelenggara dalam memberikan layanan dan intervensi? 8. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap intervensi dan layanan permasalahan kesehatan di luar Covid-19? 9. Apa yang diperlukan dari masyarakat untuk mempercepat pemulihan dampak Covid-19 khususnya di sektor kesehatan? 	
---	---------------------	--------	--	--

Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY

10	Dinas Sosial DIY	Sosial	<p>1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap sektor kesehatan terutama layanan sosial?</p> <p>2. Apakah intervensi yang diberikan sudah mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan akibat Covid-19?</p> <p>3. Kendala apa yang ditemui dalam memberikan intervensi dan layanan sektoral sosial?</p> <p>4. Inovasi apa yang dilakukan dalam memberikan intervensi dan layanan sosial?</p> <p>5. Apakah sudah puas dengan intervensi dan layanan yang diberikan?</p> <p>6. Sejauh mana kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait? Dalam hal apa?</p> <p>7. Kebutuhan apa yang perlu dipenuhi untuk memperkuat intervensi dan layanan (regulasi, SDM, sarpras)?</p> <p>8. Apakah dalam melakukan intervensi dan layanan dirasa sudah optimal? Sejauh mana kepuasan penyelenggara dalam memberikan layanan dan intervensi?</p> <p>9. Apa yang diperlukan dari masyarakat untuk mempercepat pemulihan dampak Covid-19 khususnya di sektor sosial?</p>	
----	------------------	--------	---	--

Daftar Lampiran

11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	Sosial	<p>1. Bagaimana dampak Covid-19 terhadap sektor social terutama layanan pendidikan?</p> <p>2. Apakah intervensi yang diberikan sudah mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan akibat Pandemi Covid-19?</p> <p>3. Kendala apa yang ditemui dalam memberikan intervensi dan layanan sektoral pendidikan?</p> <p>4. Inovasi apa yang dilakukan dalam memberikan intervensi dan layanan pendidikan?</p> <p>5. Apakah sudah puas dengan intervensi dan layanan yang diberikan?</p> <p>6. Sejauh mana kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait? Dalam hal apa?</p> <p>7. Kebutuhan apa yang perlu dipenuhi untuk memperkuat intervensi dan layanan? (regulasi, SDM, sarpras?)</p> <p>8. Apakah dalam melakukan intervensi dan layanan dirasa sudah optimal? Sejauh mana kepuasan penyelenggara dalam memberikan layanan dan intervensi?</p> <p>9. Apa yang diperlukan dari masyarakat untuk mempercepat pemulihan dampak Covid-19 khususnya di sektor pendidikan?</p>	
----	---	--------	--	--

Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY

12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	Sosial	<p>1. Apakah ada pengaruh yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap permasalahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk?</p> <p>2. Apa kebijakan yang diterapkan Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan tersebut?</p> <p>3. Apa program dan kegiatan yang dilakukan Dinas P3AP2 dalam mengatasi permasalahan tersebut?</p>	
13	Dinas Kebudayaan DIY	Sosial	<p>1. Apakah ada permasalahan yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan di DIY?</p> <p>2. Apa kebijakan yang diterapkan Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan tersebut?</p> <p>3. Apa program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dalam mengatasi permasalahan tersebut?</p>	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	Sosial	<p>1. Apa strategi penanggulangan bencana Pandemi yang telah diterapkan di DIY?</p> <p>2. Apa program dan kegiatan yang dilakukan BPBD DIY dalam penanggulangan Pandemi Covid-19?</p>	
15	Paniradya Kaistimewaan DIY	Sosial	<p>1. Apakah dana keistimewaan dapat digunakan untuk pemulihan sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19?</p> <p>2. Apa saja alokasi dana keistimewaan untuk pemulihan sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19?</p>	

Daftar Lampiran

16	Dinas Perhubungan DIY	Ekonomi	<p>1. Apa saja kebijakan yang diterapkan di bidang perhubungan untuk membatasi kegiatan sosial masyarakat di DIY?</p> <p>2. Apakah kebijakan tersebut efektif dalam membatasi kegiatan sosial masyarakat?</p> <p>3. Apa indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas tersebut?</p>	
17	Forum PRB DIY	Sosial	<p>1. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Forum PRB DIY dalam membantu masyarakat memulihkan kondisi sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19?</p> <p>2. Bagaimana sinergi Pemerintah dengan organisasi dalam penanganan Covid-19</p>	
18	Gerakan Kemanusiaan Sonjo (Sambatan Jogja)	Sosial	<p>1. Apa saja aktivitas yang dilakukan oleh Sonjo dalam membantu masyarakat memulihkan kondisi sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19?</p>	
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY	Ekonomi	<p>1. Bagaimana skala dampak Pandemi Covid-19 terhadap sektor pertanian di DIY?</p> <p>a. Berat b. Sedang c. Ringan</p> <p>2. Deskripsikan dampak apa saja yang dialami oleh sektor pertanian selama Pandemi.</p> <p>3. Apa kebijakan Pemda DIY dalam membantu memulihkan sektor pertanian?</p> <p>4. Apa program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pemulihan akibat Pandemi?</p>	

Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19 di DIY

20	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY	Ekonomi	<p>1. Bagaimana skala dampak Pandemi Covid-19 terhadap investasi di DIY?</p> <p>a. Berat b. Sedang c. Ringan</p> <p>2. Deskripsikan dampak yang terjadi akibat Pandemi.</p> <p>3. Apa kebijakan Pemda DIY dalam membantu memulihkan investasi di DIY?</p> <p>4. Apa program dan kegiatan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal dalam memulihkan investasi di DIY?</p>	
----	---	---------	---	--

Lampiran 4. Target dan Realisasi BST dan Beras bagi KPM Terdampak dan Peserta PKH

NO	KAB/KOTA	TARGET KPM BST TUNAI (Rp)	TARGET KPM BST BERAS (kg)	TARGET KPM PKH BERAS (kg)	RENCANA SALUR			REALISASI S/D 26 AGUSTUS 2021		
					BST Tunai (Rp.000)	BST Beras (kg)	PKH Beras (kg)	BST Tunai (Rp.000)	BST Beras (kg)	PKH Beras (kg)
1	SLEMAN	38.393	39.426	44.692	23.035.800	394.260	446.920	22.341.600	394.260	446.920
2	YOGYAKARTA	9.173	9.488	10.971	5.503.800	94.880	109.710	5.193.600	94.880	109.710
3	GUNUNGKIDUL	39.783	40.475	54.896	23.869.800	404.750	548.960	21.129.000	404.750	548.960
4	KULON PROGO	22.805	23.068	29.913	13.683.000	230.680	299.130	12.039.000	230.680	299.130
5	BANTUL	21.126	22.392	56.516	12.675.600	223.920	565.160	12.000.600	223.920	565.160
JUMLAH		131.28	134.849	196.988	78.768.000	1.348.490	1.969.880	72.703.800	1.348.490	1.969.880

Lampiran 5. Shelter Penyintas Covid-19 di DIY yang terpantau Dinas Sosial DIY per 27 Agustus 2021

NO	URAIAN	JUMLAH SHELTER	JUMLAH DAYA TAMPUNG
1	Shelter Yang Terfasilitasi dan Terpantau Oleh Dinas Sosial DIY	21	892
2	Shelter Yang Dibentuk Oleh Kabupaten/Kota	11	915
3	Shelter Yang Dibentuk Oleh Perguruan Tinggi, Lembaga dan Hotel	14	924
4	Shelter Isolasi Terpusat (Isoter) Tingkat Provinsi yang dikelola oleh KemenPUPR, BNPB, Pemda DIY, Polda DIY, Korem 072/PMK	4	396
5	Shelter dan isoter yang dikelola oleh Pemkab Kulonprogo	12	617
JUMLAH TOTAL		62	3.744

Sumber : Dinas Sosial 2021

Lampiran 6. Shelter Penyintas Covid-19 di DIY yang difasilitasi Dinas Sosial DIY per 27 Agustus 2021

NO	NAMA SHELTER	KAPANEWON	KABUPATEN	DAYA TAMPUNG (Org)
1	Shelter Bregas Sidomulyo	Bambanglipuro	Bantul	16
2	Shelter Tangguh Sumbermulyo	Bambanglipuro	Bantul	46
3	Shelter Trengginas Mulyodadi	Bambanglipuro	Bantul	20
4	Shelter Wirasehat Wirokerten	Banguntapan	Bantul	21
5	Shelter Sabdodadi	Bantul	Bantul	30
6	Shelter Wukirsari Bantul	Imogiri	Bantul	36
7	Shelter Sanan Bawuran	Pleret	Bantul	16
8	Shelter Patalan	Jetis	Bantul	16
9	Shelter SMK Kelautan	Sanden	Bantul	50
10	Shelter SMK 2 Sewon	Sewon	Bantul	51
11	Shelter Petir	Rongkop	Gunungkidul	50
12	Shelter BPTT-Dinsos DIY	Danurejan	Kota YK	261
13	Shelter BBPPKS-Dinsos DIY 1 & 2	Umbulharjo	Kota YK	100
14	Shelter Wukirsari	Cangkringan	Sleman	40
15	Shelter Sidoluhur	Godean	Sleman	10
16	Shelter Purwomartani	Kalasan	Sleman	14
17	Shelter Tamanmartani	Kalasan	Sleman	23
18	Shelter Merdikorejo	Tempel	Sleman	14
19	Shelter Pondokrejo	Tempel	Sleman	15
20	Shelter Bangunkerto	Turi	Sleman	10
21	Shelter Wanagama	Playen	Gunungkidul	51
Jumlah				892

PROFIL PENULIS



Rahayu Endang Pujiati

Anggota tim penelitian, saat ini bekerja di BPPSD DIY sebagai Peneliti Kebijakan Publik aktif pada organisasi HIMPENINDO dan menjadi pengurus HIMPENINDO DIY. Kuliah hanya sampai S1 di UPN “VETERAN” Yogyakarta. Kajian yang dipublikasikan puluhan, yang terakhir “Desa Merdeka Belajar” (2021). Kontak : ratuberuk@yahoo.com



Imam Karyadi Aryanto

anggota tim penelitian, saat ini bekerja pada Bappeda DIY sebagai perencana dan aktif sebagai Ketua Komisariat Wilayah DIY Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI). Imam Karyadi, menyelesaikan studi S1 dan S2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Ia meminati kajian terkait perencanaan strategis, governance (tata kelola) dan masalah-masalah sosial dan budaya. Terakhir mempublikasikan buku “*Tata Kelola Festival Film di DIY*” (2015), kontak: imam.karyadiaryanto@gmail.com



Emy Kusparyati, SE., M.Sc., M.Eng.

Anggota tim penelitian. Lulus S1 dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menyelesaikan S2 program *double degree* di Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan IHS, Erasmus University Rotterdam, Belanda dengan spesialisasi *Strategic Urban Planning and Policies*. Bekerja di Bappeda DIY sejak tahun 2009 dan kini bertugas sebagai Kepala Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan. Berminat pada kajian terkait perencanaan strategis, ekonomi, dan masalah-masalah di perkotaan. Kontak: emy.kusparyati@gmail.com



Pinkan Mariskania Pasuhuk

anggota tim penelitian, saat ini bekerja di Bappeda DIY sebagai Fungsional Perencana Muda. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dan S2 pada Graduate School of International Development, Nagoya University, Jepang. Saat ini aktif melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dan penelitian di Bappeda DIY, dengan minat pada bidang ekonomi pembangunan, keuangan, dan sosial.



Aris Widiyanto

Aris Widiyanto anggota tim penelitian, saat ini bekerja di Bappeda DIY sebagai Fungsional Perencana Pertama. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini aktif melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dan penelitian di Bappeda DIY.



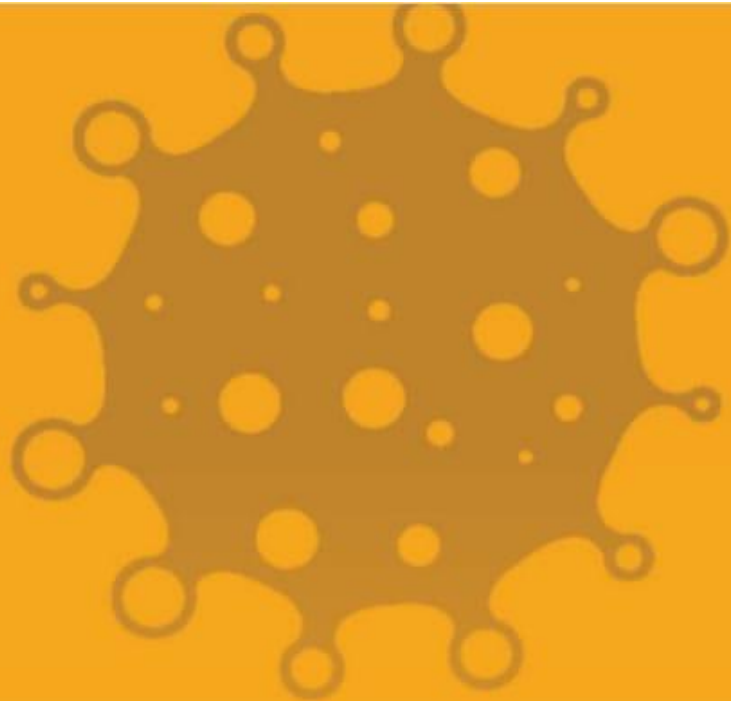
MA Fathoni

anggota tim penelitian, saat ini bekerja sebagai perencana pada Bappeda DIY dan aktif sebagai Pengelola Jurnal Perencanaan Bappeda DIY. Fathoni, menyelesaikan studi S1 di Fakultas Biologi UGM dan S2 di Sekolah Pascasarjana pada universitas yang sama serta memiliki minat terhadap kajian perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan. Kontak: fathoni4@gmail.com



Danang Aryo Prakoso

Peneliti Pertama di Pemerintah Daerah DIY dengan latar belakang studi S1 Sarjana Teknologi Pertanian dan S2 Magister Ekonomi Pertanian. Peneliti memiliki minat khusus terhadap penelitian bidang sosial ekonomi pertanian dan pengalaman di bidang adopsi Standar Standar Pertanian Berkelanjutan atau Ekososial.



ISBN 978-623-7177-87-6



9 786237 177876